

Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia

• Institusi dan Gerakan •





Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia

Institusi dan Gerakan

JILID 3

Editor Jilid 3
Azyumardi Azra
Jajat Burhanuddin
Taufik Abdullah

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM INDONESIA Jilid 3

Pengarah:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Kebudayaan

Penanggung Jawab:

Endjat Djaenuderadjat
Amurwani Dwi Lestariningsih

Penulis:

Muhammad Iskandar
Azyumardi Azra
Muhammad Hisyam
Zulkifli
Setyadi Sulaiman
Ahmad Najib Burhani
Jajat Burhanudin
Yon Machmudi
Didi Ahmadi
Moeslich Hasbullah
MUhammad Wildan
Asep Saepudin Jahar
M. Dien Madjid

Riset Ilustrasi:

Isak Purba, Agus Widiatmoko, Siti Sari, Hermasari Ayu Kusuma,
Tirmizi, Budi Harjo Sayoga, Maemunah, Esti Warastika,
Dian Andika Winda, Bariyo, Haryanto, Rina Pujiarti, Wastilah,
Putri Arum Setyawati, Suniarti, Mulyadi Amir, Mawanto

Tata Letak & Desain:

Iregha Kadireja
Martina Safitry

Keterangan Cover: Kiai sedang mengajar kitab kepada para santri di lingkungan Pesantren Cipasung, Tasikmalaya.

Sumber Cover: Dokumentasi Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya.

Sumber Peta: KITLV

Penerbit

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 9, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta - 10270
Tel./Fax.: 021-572 5044

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG:

Dilarang mengutip seluruh atau sebagian isi buku tanpa izin dari penerbit

CETAKAN 2015

ISBN: 978-602-1289-00-6

ISBN: 978-602-1289-12-9



BAB X

Gerakan Islam Kampus: Sejarah dan Dinamika Gerakan Mahasiswa Muslim

Dalam sejarah Indonesia, tercatat ada tiga periode penting menyangkut gerakan Islam oleh kalangan pemuda dan mahasiswa. Pertama, masa pergerakan, gerakan tersebut dicirikan dengan berdirinya kelompok kajian Islam di kalangan kaum muda terpelajar, yakni Jong Islamieten Bond (JIB) dan Studenten Islamic Studiesclub (SIS). Kedua, masa kemerdekaan, di mana muncul gerakan mahasiswa dengan semangat nasionalisme dan keislaman, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)—dua terakhir ini adalah organisasi mahasiswa di bawah masing-masing ormas NU dan Muhammadiyah. Terakhir, periode 1980-an hingga kini, di mana muncul gerakan mahasiswa dengan semangat Islamisme yang tinggi, seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Munculnya gerakan Islam di kampus ini dipicu oleh faktor yang berbeda di setiap periode. Meskipun, gerakan-gerakan itu mempunyai beberapa kesamaan terutama dalam hal pola-pola pergerakannya. Tulisan ini berusaha untuk melihat sejarah munculnya masing-masing gerakan mahasiswa Islam tersebut, aktivitas gerakan di ranah politik dan dakwah, pola perjuangannya, serta tantangan dan hambatan masing-masing.

Tiga periode penting dalam gerakan Islam oleh kalangan pemuda dan mahasiswa di Indonesia. Pertama, masa pergerakan, berdirinya kelompok kajian Islam di kalangan kaum muda terpelajar. Kedua, masa kemerdekaan, munculnya gerakan mahasiswa dengan semangat nasionalisme dan keislaman. Ketiga, periode 1980-an kini muncul gerakan mahasiswa dengan semangat Islamisme yang tinggi.

Dengan tulisan, gerakan-gerakan Islam kampus sejak Indonesia merdeka hingga dewasa ini bisa dipetakan. Walaupun rentang waktunya cukup panjang, tulisan ini berusaha melihat benang merah dari berbagai gerakan mahasiswa Islam tersebut, dan kemudian bisa diambil hikmahnya sebagai pelajaran bagi akademisi dan juga aktivis gerakan kemahasiswaan di masa-masa yang akan datang.

Gerakan Mahasiswa Muslim: Beberapa Perspektif Penjelasan

Secara umum bisa dikatakan bahwa gerakan Islam (termasuk gerakan Islam kampus) muncul sebagai respon terhadap sebuah realitas sosial. Sejarah mencatat bahwa gerakan-gerakan Islam kampus muncul sebagai respon pemuda dan mahasiswa Muslim atas kondisi sosial-keagamaan dan politik yang berlaku. Perubahan sosial-keagamaan dan politik, termasuk reformasi, menuntut keterlibatan sekelompok orang yang ingin terlibat dalam perubahan tersebut.

Herbert Blummer mendefinisikan gerakan sosial sebagai usaha-usaha kolektif untuk menciptakan sebuah aturan hidup baru dalam masyarakat. Teori deprivasi relatif melihat kemunculan sebuah gerakan sosial berawal dari sekelompok orang yang tidak puas dengan perubahan sosial yang terjadi, atau termarginalisasi secara politik atau ekonomi. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*), adalah tindakan seseorang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan tujuan ditentukan oleh nilai atau pilihan (*preferensi*)

Herbert Blummer mendefinisikan gerakan sosial sebagai usaha-usaha kolektif untuk menciptakan sebuah aturan hidup baru dalam masyarakat.¹ Sebagai sebuah gerakan sosial, gerakan Islam kampus bertujuan untuk membuat perubahan dalam tatanan sosial di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Gerakan Islam kampus sebagai gerakan sosial bisa dilihat dari berbagai perspektif. Teori deprivasi relatif melihat kemunculan sebuah gerakan sosial berawal dari sekelompok orang yang tidak puas dengan perubahan sosial yang terjadi, atau termarginalisasi secara politik atau ekonomi. Secara singkat, teori deprivasi relatif menjelaskan bahwa jika ada perbedaan antara yang diharapkan dan kenyataan, maka deprivasi sosial terbentuk. Deprivasi relatif ini, bila terbentuk secara kolektif, berpotensi menimbulkan enjadi sebuah gerakan sosial.²

Teori lain yang bisa membantu untuk mengupas dinamika gerakan Islam kampus adalah teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Teori yang dikembangkan oleh James S. Coleman ini berprinsip bahwa keterlibatan orang-orang dalam suatu organisasi berdasarkan pilihan secara rasional, bukan emosional. Dengan kata lain, gagasan dasar teori ini adalah tindakan seseorang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (*preferensi*). Para

pengikut sebuah organisasi secara rasional memahami tujuan gerakan sosial dan bagaimana mencapai tujuan mereka. Dengan teori ini, sebuah gerakan sosial dibedakan apakah mempunyai struktur primordial atau berdasarkan tujuan tertentu.³ Dengan teori ini dinamika sebuah gerakan sosial keagamaan bisa diungkap, tidak hanya bagaimana sebuah gerakan Islam kampus muncul tapi juga keberhasilannya menggerakkan massa dan mencapai tujuan.

Gerakan-gerakan Islam di berbagai perguruan tinggi di Indonesia berdiri dan berkembang karena disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor ideologis. Ideologi merupakan faktor yang sangat signifikan dalam membentuk kepribadian dan menggerakkan massa. Di berbagai perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi umum, gerakan Islam menjadi sebuah alternatif untuk menunjukkan identitas mahasiswa Muslim. Tidak sedikit mahasiswa Muslim terpanggil aktif di gerakan Islam kampus untuk menyebarkan pemahaman ideologis mereka. Persaingan dengan gerakan/organisasi mahasiswa agama lain dan juga organisasi non-agama menjadi faktor ideologis yang mendorong munculnya gerakan Islam di kampus. Jong Islamiyeten Bond (JIB), seperti akan dijelaskan nanti, muncul sebagai antitesa terhadap Jong Java yang kurang mengakomodir aspirasi mahasiswa Muslim.⁴

Islam menjadi identitas yang harus ditampilkan seiring dengan munculnya identitas ideologis yang lain. Munculnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang hanya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, juga didorong oleh keinginan mahasiswa Muslim untuk terlibat dalam pembangunan karakter dan mental mahasiswa Muslim Indonesia. Di era kontemporer, faktor ideologis juga kental dalam mendorong munculnya gerakan Islam seperti LDK dan KAMMI. Maraknya gerakan-gerakan Islam kampus tersebut juga bisa disebut sebagai "gerakan protes" terhadap gerakan Islam kampus yang sudah ada yang dipandang berbeda haluan dan ideologis.

Kedua, munculnya gerakan mahasiswa juga didorong oleh faktor politik. Hal ini terutama berlaku untuk kasus HMI dan PMII. Di tengah maraknya gerakan organisasi nasionalis, mahasiswa Muslim merasa terpanggil untuk terlibat dalam mewarnai sikap-sikap politik, walaupun gerakan-gerakan tersebut bukan merupakan *onderbouw* dari partai politik Islam. Walaupun demikian, secara politik Islam, gerakan mahasiswa Islam tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai gerakan Islamisme karena tidak satupun dari gerakan-gerakan tersebut mendukung perjuangan Piagam Jakarta atau membawa isu Syari'ah Islam atau bahkan *Khilafah Islamiyah*.⁵ LDK dan KAMMI yang terlihat paling konservatif diantara gerakan-gerakan yang lain juga tidak menyuarakan isu-isu Islamisme.

Ketiga, faktor globalisasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap kemunculan dan perkembangan gerakan Islam kampus. Paham dan ideologi Wahhabi yang berkembang di Indonesia hingga kemudian berpengaruh

Gerakan-gerakan Islam di berbagai perguruan tinggi di Indonesia berdiri dan berkembang karena disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor ideologis. Ideologi merupakan faktor yang sangat signifikan dalam membentuk kepribadian dan menggerakkan massa. Kedua, munculnya gerakan mahasiswa juga didorong oleh faktor politik. Ketiga, faktor globalisasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap kemunculan dan perkembangan gerakan Islam kampus. Keempat, faktor terakhir yang menjadi pemicu munculnya gerakan Islam kampus adalah yang disebut dengan political opportunity structure (POS) atau struktur kesempatan politik.

terhadap munculnya gerakan mahasiswa LDK dan KAMMI tidak bisa dilepaskan dari pengaruh globalisasi. Kemajuan teknologi informasi telah memudahkan mobilitas seseorang dari dan ke suatu negara dan tersedianya informasi secara masif, sehingga sebuah paham dan ideologi bisa berkembang secara cepat dan luas. Mahasiswa sebagai generasi yang paling mungkin bergerak (*mobile*) dan juga melek terhadap teknologi sangat memungkinkan untuk dipengaruhi sebuah paham atau ideologi.

Sidney Tarrow menegaskan bahwa menurut teori ini ada beberapa variable yang memungkinkan munculnya gerakan-gerakan sosial, (1) ketika akses ke institusi politik terbuka, (2) ketika politik tidak stabil dan stabilitas politik baru belum terbentuk, dan (3) ketika para elite politik sedang terlibat konflik.

Keempat, faktor terakhir yang menjadi pemicu munculnya gerakan Islam kampus adalah yang disebut dengan *political opportunity structure* (POS) atau struktur kesempatan politik. Sidney Tarrow menegaskan bahwa menurut teori ini ada beberapa variable yang memungkinkan munculnya gerakan-gerakan sosial, (1) ketika akses ke institusi politik terbuka, (2) ketika politik tidak stabil dan stabilitas politik baru belum terbentuk, dan (3) ketika para elite politik sedang terlibat konflik. Situasi semacam ini memberi peluang masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam membentuk ulang (*rebuilding*) identitas nasional dalam bentuk mendirikan gerakan-gerakan sosial baik yang bernuansa agama atau tidak, termasuk gerakan agama di kampus.⁶

Terkecuali JIB, hampir semua gerakan Islam kampus di Indonesia— dari yang paling awal, HMI, hingga yang terakhir KAMMI—muncul karena struktur kesempatan politik. Negara-bangsa Indonesia yang baru terbentuk tahun 1945, ketegangan dan ketidakstabilan politik, dan juga konflik di kalangan elit politik merupakan kondisi yang sangat kondusif akan munculnya gerakan mahasiswa Islam seperti HMI. Demikian pula kondisi Indonesia yang secara politik tidak stabil tahun 1950-an memberi kesempatan bagi mahasiswa Muslim yang kurang terakomodir dalam HMI untuk membentuk gerakan mahasiswa lain yaitu PMII dan IMM. Terakhir adalah lengsernya Suharto pada tahun 1998. Kesempatan terbukanya akses politik secara struktural memungkinkan munculnya berbagai gerakan sosial yang tidak hanya sebagai eforia politik tapi juga tuntutan ideologis.

Berbagai faktor di atas secara terpisah atau simultan telah mendorong munculnya gerakan Islam di kampus. Oleh karena itu, fenomena maraknya gerakan Islam kampus tidak bisa dilihat secara parsial karena kompleksitas problem sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, sebuah situasi politik misalnya tidak selalu bisa menyebabkan munculnya sebuah gerakan kalau tidak dibarengi dengan faktor pendorong yang lain.

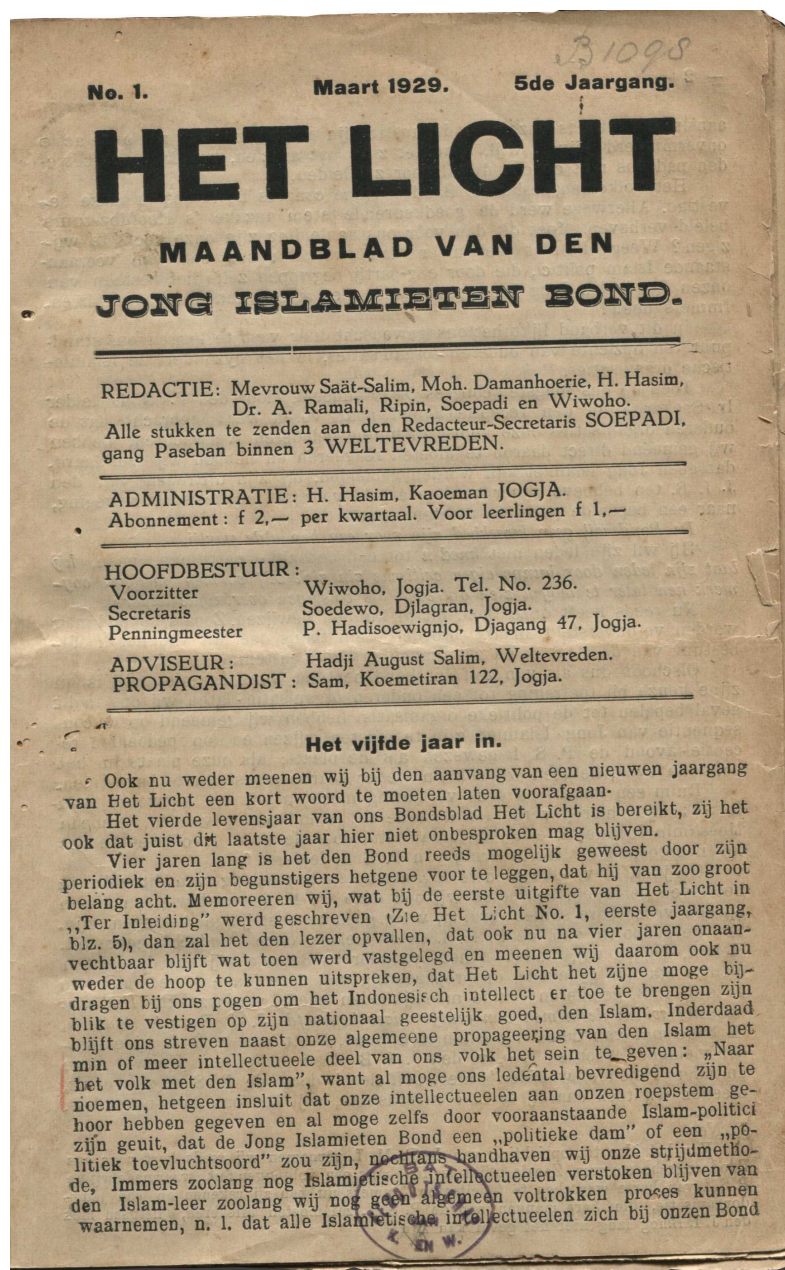
Jong Islamieten Bond (JIB): Profil Gerakan Pemuda Muslim Masa Kolonial

Berdiri di akhir-akhir masa penjajahan Belanda, JIB secara sosio-historis lahir ketika identitas negara-bangsa Indonesia belum terbentuk. Kelahiran JIB disebabkan oleh *blessing in disguise* terhadap dua hal: politik etis pemerintah kolonial Belanda dan keberadaan Jong Java. Setelah mendapatkan kritikan dari berbagai pihak tentang sistem tanam paksa yang sangat menguntungkan pemerintah Belanda, Ratu Wilhelmina akhirnya pada 17 September 1901 mencanangkan politik etis kepada masyarakat Hindia Belanda sebagai bentuk balas budi yang mencakup 3 aspek: irigasi, emigrasi, dan edukasi. Di kedua ranah pertama, kebijakan ini banyak disalahgunakan untuk keuntungan perkebunan-perkebunan milik Belanda atau milik perseorangan Belanda. Tercatat dalam sejarah bahwa politik etis telah membuat keuntungan Belanda di bidang perkebunan dan pertambangan semakin berlipat. Dengan kata lain, bahwa dalam kebijakan politik etis lebih banyak janji daripada bukti.⁷

Di ranah pendidikan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan banyak sekolah di hampir seluruh wilayah. Mulai dari tingkat dasar, menengah, seperti *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* dan (MULO) *Algemeen Middelbare School* (AMS) hingga tingkat atas seperti *Opleidingscholen voor inlandsche Ambtenaren* (Sekolah Pelatihan untuk Pejabat Pribumi, OSVIA) dan *School tot Opleiding van Indische Artsen* (Sekolah Pendidikan Dokter Hindia, STOVIA). Senada dengan irigasi dan emigrasi, di ranah pendidikan ini juga banyak penyimpangan, yaitu sekolah-sekolah ini diharapkan bisa menyediakan tenaga-tenaga administratif yang murah untuk mendukung penjajahan Belanda. Politik etis inilah yang melahirkan munculnya kelompok terdidik yang kemudian tergabung dalam organisasi modern seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), dan Jong Islamieten Bond (1925).⁸

Dari perspektif Islam, Nurcholish mencatat bahwa politik etis kurang berdampak pada kelompok ulama karena sikap non-kooperatif mereka. Akhirnya, pendidikan dalam kerangka politik etis menyebabkan jurang pemisah antara elit tradisional priyayi dengan rakyat Muslim. Munculnya gerakan-gerakan Islam pada awal abad ke-20 lebih merupakan perlawanan rakyat dengan ideologi Islam untuk menentang hegemoni kolonial dan Cina. Oleh karena itulah maka perlawanan rakyat Islam juga berideologikan Islam sosialis.⁹

JIB juga lahir karena kekecewaan generasi muda Muslim terhadap Jong Java. Munculnya kelas terdidik di Hindia Belanda saat itu memberikan inspirasi bagi banyak pemuda untuk membentuk organisasi-organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sunda, Jong Celebes dan lain-lain. Raden Syamsurizal (dikenal



Majalah *Het Licht* yang terbit bulan Maret 1929. Majalah *Het Licht* merupakan majalah yang digunakan oleh Jong Islamieten Bond untuk menyebarkan ide-ide dan gagasan organisasi.

Sumber: Perpustakaan Nasional

dengan Raden Syam), mantan Walikota Jakarta yang merupakan ketua Jong Java, melihat perlu adanya kursus Islam bagi anggota Jong Java yang Muslim. Selain karena rata-rata anggota Jong Java beajar di sekolah Belanda yang tidak memberikan pendidikan agama, hal ini juga berdasarkan fakta bahwa Jong Java telah mengadakan kursus agama bagi anggota yang beragama Kristen. Ketika ide ini dibawa pada Kongres Jong Java ke-7 pada Desember 1924 di Yogyakarta, ide ini ditolak lebih dari separuh anggota kongres lewat pungutan suara. Hal ini merupakan *blessing in disguise* karena akhirnya Raden Syam dan teman-teman Muslim Jong Java terdorong untuk membentuk organisasi baru yang kemudian diberi nama Jong Islamieten Bond (JIB) pada 1 Januari 1925. Ide ini didukung oleh sekitar 200 pemuda dan pelajar saat itu dan juga didukung oleh tokoh perjuangan Haji Agus salim yang kemudian menjadi penasehat JIB.¹⁰

Sesuai dengan tujuannya untuk menyatukan pemuda dan pelajar Islam serta untuk wadah pembelajaran agama Islam, JIB mengadakan kursus agama Islam bagi anggota JIB. Untuk mendukung itu, JIB menerbitkan majalah bulanan yang diberi nama *Het Licht* (Cahaya) yang berperan sebagai media komunikasi antar-anggota JIB seiring dengan perkembangan JIB yang sangat pesat di berbagai kota besar di Hindia Belanda. Di majalah inilah banyak muncul artikel-artikel tentang Islam dan kebangsaan yang turut serta mendewasakan pemuda dan pelajar Hindia Belanda.¹¹

Langkah pemuda dan pelajar Muslim mendirikan JIB merupakan *breakthrough* atau terobosan yang signifikan saat itu. Di saat pemuda-pemuda disibukkan dengan organisasi-organisasi yang beridentitas kesukuan, seperti telah disebut di atas, sejumlah pemuda merasa berkepentingan membentuk organisasi yang menggunakan identitas Islam sebagai pemersatunya. Secara sosio-historis harus

dipahami bahwa mendirikan organisasi yang menyatukan banyak identitas bangsa bukanlah perkara yang mudah, apalagi identitas agama. Tekanan pemerintah Belanda saat itu sangat membatasi ruang gerak bangsa Indonesia. JIB mendapatkan tantangan paling signifikan pada tahun 1926, yaitu ketika Kongres Pemuda I di Batavia di mana semua organisasi pemuda diharapkan bisa bergabung dalam satu wadah organisasi pemuda yang berlandaskan kebangsaan. Wiwoho Purbohadijoyo selaku ketua JIB mengambil keputusan yang sulit yaitu tidak bergabung dan tetap menjadi organisasi berlandaskan Islam. Karena keputusan ini, banyak tuduhan bahwa JIB adalah organisasi anti-nasionalisme. Namun demikian, kegiatan-kegiatan JIB menegasikan tuduhan itu, dan tetap dekat dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang lain.¹²

Walaupun beridentitas Islam, JIB berperan signifikan dalam pembentukan nasionalisme Indonesia. Hal ini didukung kondisi psikologis bangsa Indonesia di mana semangat nasionalisme memang sedang tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan munculnya berbagai macam organisasi atau perkumpulan. Ada beberapa indikasi kuat yang mendukung asumsi ini. Majalah *Het Licht* yang terbit sejak bulan Maret 1925 itu banyak menurunkan artikel tentang kebangsaan seperti artikel "Islam dan Semangat Kebangsaan", "Nasionalisme".¹³

Selain itu, pada tahun 1927 JIB mendirikan organisasi kepanduan yang bernama National Indonesische Padvinderij (NATIPIJ). Noer menjelaskan bahwa M. Natsir yang memberi nama kepanduan JIB yang menggunakan nama Indonesia. Ini menandakan bahwa saat itu Natsir tidak mempertentangkan Islam dan identitas kebangsaan.¹⁴ Harus diakui bahwa organisasi bentukan JIB ini adalah organisasi pertama di wilayah Hindia Belanda yang menggunakan nama Indonesia (*Indonesische*).¹⁵ Semangat nasionalisme JIB terlihat dalam keterlibatan JIB pada persiapan dan kepanitiaan Kongres Pemuda II di Jakarta yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Djohan Mohammad Tjai adalah perwakilan JIB yang ikut menandatangani prasasti pemuda bersejarah itu. JIB berupaya memasyarakatkan bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa persatuan tersebut secara bersangsur-ansur dalam majalah *Het Licht* sejak Sumpah Pemuda itu.¹⁶

Pada tahun 1927 JIB mendirikan organisasi kepanduan yang bernama National Indonesische Padvinderij (NATIPIJ). Organisasi bentukan JIB ini adalah organisasi pertama di wilayah Hindia Belanda yang menggunakan nama Indonesia (*Indonesische*).

Seiring dengan semangat Islam dan nasionalisme tersebut, JIB berkembang pesat, terutama pada masa kepemimpinan Wiwoho Purbohadijoyo (1926-1929) dan Kasman Singodimedjo (1929-1935). Dalam periode Wiwoho, JIB banyak mengadakan kursus-kursus agama Islam di berbagai cabang, juga melebarkan sayap ke kota-kota kecil di Jawa serta meneguhkan identitas sebagai organisasi Islam. Sedangkan dalam periode kepemimpinan Kasman, JIB berhasil mendirikan banyak cabang di Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Antusiasme pemuda dan pelajar tercatat bahwa hingga tahun 1933 JIB telah memiliki 55 cabang dan 4.000-an anggota di Jawa dan Sumatera. Beberapa tokoh bangsa yang pernah aktif di JIB di antaranya adalah Kasman Singodimejo, M. Roem, Jusuf Wibisono (JIB Pusat), Sukarno (JIB Bandung), Cholid Rasyidi

(JIB Betawi), Burhanuddin Harahap (JIB Yogyakarta). M. Roem menegaskan bahwa saat itu menjadi anggota JIB merupakan suatu kebanggaan. Satu hal yang menambah kebanggaan menjadi anggota JIB adalah karena bisa dekat dengan tokoh-tokoh nasional seperti H. Agus Salim, M. Natsir dll. Pada 1929, M. Natsir tercatat sebagai anggota JIB Bandung yang mengajarkan Islam pada para anggota lainnya.¹⁷

Identitas Islam JIB inilah yang mendekatkan hubungan JIB dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis). Beberapa tokoh JIB bahkan juga dekat dengan Ahmad Soorkati (pendiri Al-Irsyad) untuk bertanya urusan agama.¹⁸ Hal lain yang mendorong pertumbuhan JIB adalah sikap pemerintah Hindia Belanda yang menganggap JIB dan juga gerakan-gerakan Islam lainnya bukan sebagai ancaman, tapi justru menguntungkan Belanda karena dianggap sebagai resistensi lokal terhadap tumbuhnya komunisme yang semakin kuat.¹⁹

Di tengah gegap gempita zaman pergerakan Indonesia, JIB mampu tampil sebagai gerakan pemuda yang menyatukan idealisme Islam dan kebangsaan Indonesia. JIB bisa dikatakan organisasi pemuda dan pelajar Muslim pertama yang memberikan ide bagi generasi-generasi muda berikutnya.

Sejak 1934, JIB mendapatkan banyak tantangan sehingga mengalami banyak kemunduran. Sebagaimana diketahui, anggota JIB tidak hanya pelajar sekolah menengah (MULO atau AMS), tapi juga banyak diikuti oleh pelajar dari tingkat atas (Hoge School) atau pemuda di usia umur 14 tahun ke atas. Beberapa dari mereka merasa bahwa JIB lebih banyak aktif di level pelajar sekolah menengah, sehingga mereka merasa perlu mendirikan organisasi baru. Oleh karena itulah maka M. Roem dan Yusuf Wibisono mendidikan *Studenten Islam Studieclub* (SIS) pada 1934. Walaupun ini tidak bisa dianggap sebagai friksi besar dalam JIB, hal ini sedikit-banyak mengurangi aktivis JIB karena sebagian lainnya aktif di SIS. Tantangan lainnya adalah keinginan beberapa pengurus JIB seperti Kasman dan M. Natsir untuk menjadikan JIB menjadi organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan Persis yang bisa mendirikan sekolah dan rumah sakit. Isu ini kemudian menjadi pembahasan serius pada kongres ke-6 dan juga ke-7. Walaupun JIB akhirnya tidak mengubah statutenya, permasalahan ini telah menjadikan M. Roem dan Yusuf Wibisono keluar dari JIB dan mendirikan organisasi baru SIS. Sejak itu, JIB cenderung menurun hingga kemudian dibubarkan oleh Jepang pada 7 Maret 1942.²⁰

Walaupun JIB tidak bisa menghantarkan Indonesia sampai merdeka, peran JIB dalam menorehkan semangat Islam dan nasionalisme bangsa Indonesia tidak bisa dianggap kecil. Di tengah gegap gempita zaman pergerakan Indonesia, JIB mampu tampil sebagai gerakan pemuda yang menyatukan idealisme Islam dan kebangsaan Indonesia. JIB bisa dikatakan organisasi pemuda dan pelajar Muslim pertama yang memberikan ide bagi generasi-generasi muda berikutnya. Keberadaan mantan-mantan anggota dan aktivis JIB di pentas nasional merupakan bukti sejarah bahwa JIB tidak hanya mampu tampil sebagai organisasi pemuda Islam pertama di Indonesia, tapi juga bisa dianggap sebagai tonggak munculnya intelektual muda Muslim Indonesia di pentas nasional. Kader-kader JIB tidak hanya Muslim yang baik, tapi mereka merupakan intelektual-negarawan Muslim yang tangguh.

HMI, PMII dan IMM: Profil Gerakan Mahasiswa 1950-an

Memasuki Indonesia merdeka, gerakan mahasiswa Islam ditandai dengan berdirinya sejumlah organisasi dengan basis massa di kampus. Tiga organisasi berdiri, yang tidak saja terus eksis hingga kini tapi juga telah memberi pentrking dalam perkembangan Islam Indonesia. Ketiga organisasi tersebut adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dua yang disebut terakhir ini berafiliasi dengan dua ormas terbesar di Indonesia, yakni masing-masing NU dan Muhammadiyah. Penjelasan berikut ini akan menguraikan ketiga organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Secara historis, HMI lahir dalam kondisi sosial dan politik yang sangat tidak kondusif. Sebagai negara yang baru berdiri, Indonesia mengalami berbagai tantangan yang sangat berat baik eksternal maupun internal. Secara eksternal, kedatangan Belanda dan sekutunya setelah Indonesia merdeka menjadi tantangan berat secara politis bagi pemerintah Indonesia. Hal ini juga berdampak pada tantangan secara internal, di mana elite politik Indonesia saat itu mengalami polarisasi tentang bagaimana sikap pemerintah Indonesia menghadapi agresi Belanda. Perdana Menteri Syahrir (Partai Sosialis) lebih cenderung mengedepankan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda dan sekutu, sedangkan pihak oposisi yaitu Masyumi dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) menginginkan angkat senjata untuk melawan Belanda dan sekutunya.

HMI lahir pada periode yang dikenal sebagai Masa Revolusi, 5 Februari 1947 di Yogyakarta. Diprakarsai oleh Lafran Pane. Kelahiran HMI pada tahun 1947 merupakan salah satu bentuk revolusi sosial saat itu.

HMI lahir pada periode yang dikenal oleh sejarah sebagai masa revolusi. Namun demikian, revolusi yang terjadi saat itu tidak hanya revolusi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam menghadapi agresi Belanda, tapi juga merupakan periode yang dikenal sebagai revolusi sosial. Penjajahan Belanda yang berlangsung selama periode yang sangat lama dan represif telah menanamkan sistem feodal yang sangat kuat di masyarakat. Tidak hanya itu, periode 1945-1949 juga merupakan masa di mana Indonesia sedang mencari bentuk dan identitasnya. Periode ini juga bisa dikatakan sebagai masa di mana euforia sosial dan politik sedang terjadi. Berbagai gerakan sosial dan keagamaan muncul sebagai kontribusi masyarakat dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Kelahiran HMI pada tahun 1947 merupakan salah satu bentuk revolusi sosial saat itu.

Kantor Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Menteng, Jakarta.

Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.



HMI lahir pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta, kota perjuangan di masa revolusi. Yogyakarta sangat kondusif sebagai tempat berdirinya pergerakan mahasiswa seperti HMI, tidak hanya karena Yogyakarta sebagai ibukota negara Indonesia, tapi juga karena keberadaan beberapa perguruan tinggi saat itu. Sebenarnya, di level nasional sudah ada gerakan pemuda Islam yaitu GPII (berdiri 1945), namun kurang menyentuh kalangan terpelajar. Gerakan mahasiswa yang sudah ada saat itu, yaitu Persyarikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY berdiri 1946) dan Sarikat Mahasiswa Indonesia Solo (SMI berdiri 1946) dirasa kurang berhasil karena merupakan gerakan lokal dan juga sekuler. Kerinduan kalangan terpelajar akan gerakan untuk kalangan terpelajar Muslim di level nasional—seperti JIB dan SIS di masa kolonial—telah mendorong munculnya Himpunan Mahasiswa Islam dan Pelajar Islam Indonesia tahun 1947. Ridwan Saidi mencatat bahwa secara ideologis HMI merupakan penerus idealisme JIB, walaupun hal dibantah secara tegas oleh penulis HMI lain, yang mengatakan bahwa HMI tidak ada hubungannya dengan JIB.²¹

Adalah Lafran Pane yang sering disebut sebagai pemrakarsa berdirinya HMI. Lafran Pane adalah adik dari tokoh sastra Indonesia terkenal Sanusi pane dan Armijn Pane. Pane saat itu tercatat sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam (STI, sekarang UII). Latar belakang pendidikan agama yang kuat serta interaksi Pane dengan para dosen STI—seperti Abdul Kahar Muzakir, HM. Rasjidi, Fathurrahman Kafrawi, Kasman Singodimedjo, dan Prawoto Mangkusasmito—yang kemudian menginspirasinya untuk mendirikan gerakan mahasiswa Islam. Hampir identik dengan berdirinya JIB, HMI lahir untuk tujuan mengajarkan nilai-

nilai Islam bagi mahasiswa. Persiapan-persiapan untuk mencari dukungan telah dilakukan oleh Lafran Pane dan kawan-kawan sejak akhir 1946. Didukung oleh 15 mahasiswa-mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam (STI) maka HMI secara resmi berdiri.²²

Sejak 1950-an, HMI mulai berkembang di kalangan mahasiswa non-STI seperti Balai Perguruan Tinggi Gadjahmada (embrio UGM) dan Sekolah Teknik Tinggi.²³ Rahardjo mencatat bahwa HMI yang berkembang di perguruan tinggi non-agama adalah untuk mewujudkan idealisme “ulama-intelekt”.²⁴ HMI yang muncul di masa itu merupakan revolusi sosial mahasiswa Muslim. Seiring dengan proses pembentukan identitas negara-bangsa yang baru, sebagian umat Islam disibukkan dengan partai politik dan isu seputar Piagam Jakarta sebagai upaya umat Islam untuk mewarnai kehidupan politik dan berbangsa. HMI merupakan sebuah upaya kelompok mahasiswa untuk juga ikut mewarnai kehidupan kampus. Saat itu, gerakan mahasiswa sekuler lebih dominan di kampus-kampus. HMI yang secara jelas bersimbolkan Islam mengalami kesulitan untuk mendapatkan anggota. Kondisi politik Indonesia yang masih belum stabil juga memaksa HMI terlibat dalam memanggul senjata memerangi Belanda dan juga pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun. Baru mulai 1950-an akhir HMI mulai melebarkan sayapnya ke luar Yogyakarta seperti di Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Padjadjaran dan lain lain. Pada dasawarsa 1960-an, HMI telah memiliki basis masa di berbagai perguruan tinggi umum di atas. Mereka inilah yang pada 1965-1966 nanti menjadi motor perlawanan terhadap PKI.²⁵ Dari berbagai universitas tersebut di atas lahir tokoh-tokoh HMI seperti Dachlan Ranuwihardjo, M. Imaduddin Abdurrahim, Ismail Hasan Metareum, Sulastomo, Endang Saifuddin Anshari dan lain-lain.

Perkembangan HMI menjadi organisasi besar tidak bisa dilepaskan dari peran A. Dachlan Ranuwihardjo (mantan Ketua PB HMI 1950-1951) yang telah membawa PB HMI pindah ke Jakarta pada 1950. Pertumbuhan HMI juga dimungkinkan karena Dachlan juga pernah dekat dengan Sukarno yang secara moral ikut mendukung perjuangan HMI. Kedekatan Sukarno dengan HMI merupakan salah satu faktor HMI tidak jadi dibubarkan oleh presiden pada 1960-an karena tuntutan PKI.²⁶

Seiring dengan perjalanan waktu, HMI secara organisasi juga semakin dewasa, dan semakin diminati oleh mahasiswa baik di universitas agama maupun umum. Dachlan bahkan menegaskan bahwa HMI memiliki 3 karakteristik kepribadian yaitu 1) berintegrasi dengan dan dalam kehidupan nasional bangsa, 2) berfikir, bersikap, dan melangkah secara mandiri, dan 3) ikut memelihara ukhuwwah islamiyah.²⁷

HMI yang berkembang di perguruan tinggi non-agama adalah untuk mewujudkan idealisme “ulama-intelekt”.

Perkembangan HMI menjadi organisasi besar tidak bisa dilepaskan dari peran A. Dachlan Ranuwihardjo (mantan Ketua PB HMI 1950-1951) yang telah membawa PB HMI pindah ke Jakarta pada 1950.

Secara ideologis, HMI sering dianggap sebagai *onderbouw*-nya Masyumi, seperti dikatakan Victor Tanja yang mendasarkan asumsinya pada keputusan Kongres Umat Islam 1949 bahwa HMI dan PII adalah satu-satunya organisasi mahasiswa dan pelajar. Hal lain yang mendorong asumsi banyak orang adalah kedekatan ideologis HMI dengan Masyumi. Pada Kongres V di Medan (1957), HMI menuntut partai-partai Islam seperti Masyumi, NU, PSII, dan PERTI untuk bisa memperjuangkan Islam menjadi dasar negara RI dalam Majelis Konstituante. Sitompul menegaskan bahwa tuntutan ini legal karena Majelis Konstituante adalah yang dibentuk secara resmi oleh presiden untuk membuat konstitusi negara yang baru.²⁸

Sitompul juga menegaskan bahwa kebetulan HMI dan Masyumi memiliki beberapa kesamaan ideologis karena kondisi umat Islam saat itu, meskipun MI tetap organisasi yang independen dan bukan *onderbouw* Masyumi. Hal ini juga dibuktikan bahwa aktivis HMI saat itu tidak harus memilih partai Masyumi pada pemilu 1955, tapi terserah pada hati nurani masing-masing.²⁹

HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar ini mengalami masa kejayaan pada periode 1970-an. HMI mempunyai peran penting dalam membentuk kecendekiawanan Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid mengeluarkan pernyataan yang sangat terkenal yaitu "Islam Yes, Politik No".

HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar ini mengalami masa kejayaan pada periode 1970-an. Dinamika intelektual di kalangan aktivis HMI berkembang, seperti adanya *Limited Group*-nya Djohan Effendi, M. Dawam Rahardjo dan Ahmad Wahib di Yogyakarta. Selain tokoh-tokoh di atas, lahir juga dari rahim HMI beberapa tokoh nasional seperti Nurcholish Madjid, M. Amien Rais, Fahmi Idris, Deliar Noer, Adi Sasono, dan lain-lain.³⁰ Rahardjo menekankan bahwa HMI mempunyai peran penting dalam membentuk kecendekiawanan Nurcholish Madjid.³¹ Kebijakan depolitisasi umat Islam yang dilancarkan pemerintah Orde Baru telah membuahkan sikap politik kooperatif HMI. Dalam kondisi politik seperti ini, Nurcholish Madjid mengeluarkan pernyataan yang sangat terkenal yaitu "Islam Yes, Politik No". Pernyataan ini sebagai upaya untuk mengubah pola perjuangan umat Islam yang selama ini lebih banyak di politik ke pola perjuangan kultural.

Dinamika internal dalam HMI pada akhir 1960-an cukup menggoncang HMI. Ahmad Wahib dan Djohan Effendi adalah dua aktivis HMI Jawa Tengah yang dikenal dengan pemikirannya yang sangat kritis dan progresif. Sejak 1967-an mereka merasa tidak "kerasan" di dalam HMI karena organisasi mahasiswa ini kurang mengakomodir pemikiran mereka yang progresif. Beberapa aktivis HMI bahkan menyebut HMI bukan habibat yang tepat bagi Wahib dan Effendi. Dinamika (untuk tidak menyebut konflik) internal tersebut berujung pada keluarnya Wahib dan Effendi dari HMI pada September 1969.³²

Organisasi mahasiswa HMI mengalami kemunduran dan perpecahan pada 1980-an. Tahun-tahun ini sebenarnya merupakan puncak dari depolitisasi pemerintah Orde Baru. Berbagai konflik vertikal terjadi pada tahun-tahun ini seperti kasus Komando Jihad (1980-an), Usroh (1985-1986), dan Tanjung Priok (1984). Pada

Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Agustus 1982, Soeharto melontarkan ide untuk mereduksi fanatisme golongan dan ideologi dengan regulasi tentang Asas Tunggal yang akhirnya ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Asas Tunggal Pancasila. UU ini mengharuskan semua organisasi sosial dan politik untuk menjadikan Pancasila sebagai asas pada AD/ART-nya. Pada kongres HMI ke-15 di Medan 1983, disepakati dengan tidak bulat bahwa HMI menerima kebijakan Asas Tunggal pemerintah. Keputusan ini dibulatkan di kongres di Padang pada 1986 sebagai upaya untuk menyelamatkan HMI daripada dibubarkan oleh pemerintah. Namun, ada sekelompok HMI yang tetap mempertahankan asas Islam dan kemudian mendirikan Majelis Penyelamat Organisasi, HMI-MPO. HMI-MPO melihat bahwa mengadopsi Pancasila sebagai Asas Tunggal merupakan penyimpangan terhadap misi utama HMI. Sejak itu dikenal ada 2 HMI, yaitu HMI Dipo yang berkantor pusat di Jl. Diponegoro dan HMI MPO. HMI Dipo berjalan sebagai organisasi formal atau legal, sedangkan HMI MPO hidup sebagai gerakan bawah tanah hingga reformasi 1998.

Sebagai organisasi Islam kampus, HMI mempunyai kiprah banyak di kalangan mahasiswa. Sesuai dengan tujuan utama pendirian HMI untuk memberikan pemahaman Islam bagi mahasiswa, HMI dikenal di berbagai kampus di Indonesia yang secara periodik melaksanakan pelatihan dan pengkaderan mahasiswa seperti Basic Training (Batra), Intermediate Training (Intra), dan Senior Course. Selain memberikan pelatihan tentang Islam normatif, pelatihan-pelatihan itu juga memberikan pemahaman bagi mahasiswa (baru) tentang ketrampilan berorganisasi dan berkomunikasi, khususnya dalam kehidupan di kampus. Rusli Karim mengkritik bahwa sejauh ini kegiatan-kegiatan HMI lebih banyak intern dan tidak banyak menyentuh ke masyarakat.³³

Walaupun HMI adalah organisasi sosial keagamaan, HMI mempunyai peran signifikan pada negara di ranah politik. Tidaklah mengherankan jika HMI sering disebut sebagai organisasi pencetak kader-kader politik. Dibandingkan dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang lain, bisa dipastikan HMI yang paling banyak berkontribusi dalam menyediakan kader-kader politisi. Tokoh-tokoh seperti Akbar Tanjung, Adi Sasono, M. Amin Rais, AM. Fatwa, adalah sebagian dari alumni HMI yang mempunyai kiprah di level politik.

Meskipun Demikian HMI mempunyai peran signifikan pada negara di ranah politik. HMI yang paling banyak berkontribusi dalam menyediakan kader-kader politisi. Tokoh-tokoh seperti Akbar Tanjung, Adi Sasono, M. Amin Rais, AM. Fatwa, adalah sebagian dari alumni HMI yang mempunyai kiprah di level politik.

Era reformasi memberikan nuansa berbeda bagi HMI. *Political opportunity structure* yang terjadi pada era reformasi memberikan peluang bagi HMI Dipo dan HMI MPO untuk bersatu. Diawali dengan kongres ke-22 di Jambi pada 1999, HMI Dipo menetapkan kembali asas Islam sebagai upaya untuk mengembalikan jati diri HMI dan juga dengan harapan HMI MPO bisa bergabung. Berbagai upaya rekonsiliasi atau islah dilakukan untuk menyatukan kedua HMI itu, namun hingga saat ini masih belum bisa sepakat untuk bersatu. Walaupun secara normatif kedua HMI sudah sama-sama berasaskan Islam, secara empiris HMI Dipo dikenal lebih moderat sedangkan HMI MPO cenderung lebih konservatif.

Tantangan internal telah menyerap lebih banyak energi HMI sehingga akhir-akhir ini HMI dirasa kurang responsif terhadap isu-isu nasional. Dengan berkaca pada HMI pada 1970-an, di masa mendatang HMI diharapkan lebih visioner dan mempunyai kontribusi lebih konkrit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

PMII berdiri pada 17 April 1960, sebagai respon dari kecenderungan politik umat Islam sejak 1950-an yang tidak lagi menganggap Masyumi sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam.

PMII berdiri pada 17 April 1960, sebagai respon dari kecenderungan politik umat Islam sejak 1950-an yang tidak lagi menganggap Masyumi sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam.³⁴ Ketegangan politik di Masyumi mulai terlihat dengan keluarnya tokoh-tokoh eks-Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dari Masyumi pada 1947. Ketidakpuasan tokoh-tokoh eks-PSII juga dirasakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang merasa bahwa Masyumi didominasi oleh kalangan modernis sehingga aspirasi NU kurang diakomodir di Masyumi. Pada 1952 akhirnya NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri.

Lambang Pengurus Besar PMII. PMII merupakan cermin ketidakpuasan sebagian mahasiswa Muslim terhadap HMI, namun keberadaan PMII tidak bisa dilepaskan dari dukungan NU sebagai organisasi induknya
Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya



Kondisi politik tersebut secara otomatis berpengaruh di kalangan terpelajar NU. Selain aspek politik, kondisi sosiologis juga berpengaruh yaitu semakin banyaknya kelompok terpelajar di kalangan NU. Organisasi kelompok terpelajar NU yang muncul pertama kali adalah Ikatan Pelajar NU (IPNU) berdiri pada 1954 yang mewadahi baik pelajar maupun mahasiswa. Beberapa upaya untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU telah dilakukan seperti berdirinya Ikatan Mahasiswa NU (IMANU) dan Keluarga Mahasiswa NU (KMNU) yang berdiri pada 1955. Namun, keberadaan organisasi mahasiswa itu kurang mendapatkan dukungan dari Pimpinan Besar NU karena dikhawatirkan akan melemahkan IPNU yang baru berdiri. Setelah IPNU cukup kuat eksistensinya, Konferensi Besar IPNU di Yogyakarta tahun 1960 menetapkan perlunya organisasi mahasiswa. Selanjutnya pada April 1960 secara resmi PMII berdiri di Surabaya dengan Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, M. Khalid Mawardi sebagai wakil ketua, dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum. Sebenarnya, saat itu Mahbub adalah aktivis HMI. Namun demikian, pendirian PMII yang pada dasarnya merupakan pembelotan mahasiswa yang berafiliasi NU ke PMII dianggap oleh HMI sebagai "pengkhianatan" terhadap keputusan Kongres Umat Islam 1949. Oleh karena itu, beberapa tokoh PMII seperti Mahbub Djunaidi kemudian dikeluarkan dari HMI.³⁵

Mahbub menegaskan bahwa PMII berdiri karena HMI tidak mampu menampung aspirasi mahasiswa berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah.³⁶ Secara sosio-historis bisa dikatakan bahwa walaupun berdirinya PMII merupakan cermin ketidakpuasan sebagian mahasiswa Muslim terhadap HMI, namun keberadaan PMII tidak bisa dilepaskan dari dukungan NU sebagai organisasi induknya.

Sesuai dengan namanya, PMII diharapkan bisa menjadi organisasi yang dinamis dan terbuka. Nama “pergerakan” diharapkan mampu menampung aspirasi dinamis kalangan intelektual muda. Sengaja organisasi ini tidak menggunakan nama NU sebagaimana organisasi mahasiswa sebelumnya. Hal ini sebagai upaya untuk membuat PMII sebagai organisasi yang terbuka bagi semua golongan, khususnya yang aspirasinya belum tersalurkan di HMI. Dinamika mahasiswa yang progresif diharapkan mampu menjadi sebuah media untuk membentuk karakter mahasiswa Muslim yang tangguh dan di kemudian hari menjadi bisa menyumbangkan sesuatu hal yang positif bagi bangsa dan negara.

Seiring dengan pertumbuhan kelas terdidik yang semakin banyak di Indonesia, PMII tumbuh dan berkembang dengan cepat. Migrasi besar-besaran mahasiswa tradisional ke PMII mempercepat pertumbuhan PMII. Di akhir 1960-an, anggota PMII sudah mencapai ribuan yang didominasi oleh mahasiswa IAIN.³⁷ Pada Kongres PMII perta tahun 1961 dihadiri oleh 13 cabang yang masih didominasi oleh cabang di wilayah Jawa dan Sumatera, sedangkan pada Kongres PMII II di Yogyakarta dihadiri oleh 31 cabang termasuk dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi.³⁸

Semangat kebangsaan PMII juga terbukti dengan komitmen organisasi pada urusan negara. Selain terlibat dalam proses peralihan Orde Lama ke Orde Baru yaitu masuk dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi



Ketua PMII Pusat ke-16 sampai ke-21 (kiri ke kanan), Mahbub Junaidi (1960-1967), Muhammad Zamroni (1967-1973), Abduh Paddare (1973-1977), Ahmad Bagja (1977-1981), Muhyidin Arubusman (1981-1985) dan Suryadharma Ali (1985-1988).

Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya

Pemuda Pelajar Indonesia (KAMI-KAPPI) tahun 1966, PMII juga terlibat aktif dalam menolak PKI di bumi Indonesia. Ketergantungan pada NU menjadikan PMII kurang independen dan tidak bisa masuk dalam Kelompok Cipayung³⁹ yang beranggotakan HMI, GMNI, GMKI, dan PMKRI. Dependensi PMII ini tidak hanya secara organisatoris tapi juga politis karena NU saat itu berfusi ke PPP. Pada 1972 secara resmi PMII mendeklarasikan independensi-nya pada Deklarasi Murnajati sehingga pada 1974 PMII bisa masuk dalam Kelompok Cipayung. Masuknya PMII sebagai anggota Kelompok Cipayung meneguhkan PMII sebagai organisasi mahasiswa yang punya komitmen tinggi terhadap urusan bangsa dan negara.

PMII akhirnya menetapkan khittah 1926 sebagai strategi perjuangannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sebagai konsekuensinya, PMII lebih banyak fokus urusan internal, yaitu mengembangkan aspek intelektualitas dan memberdayakan *civil society*.

Pada masa Orde Baru, PMII juga terkena imbas depolitisasi umat Islam. Sebagai organisasi sosial keagamaan, PMII terkena kebijakan pemerintah tentang Pancasila sebagai Asas Tunggal. Tidak jauh berbeda dengan organisasi pemuda dan mahasiswa yang lain, PMII menerima Asas Tunggal sebagai sebuah keharusan yang tidak bisa ditolak. Penerimaan Pancasila sebagai Asas Tunggal tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan organisasi kepada pemerintah, tapi juga merupakan strategi politik. Senada dengan NU, PMII akhirnya menetapkan khittah 1926 sebagai strategi perjuangannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sebagai konsekuensinya, PMII lebih banyak fokus urusan internal, yaitu mengembangkan aspek intelektualitas dan memberdayakan *civil society*. Depolitisasi pemerintah Orde Baru justru merupakan *blessing in disguise* bagi PMII karena momen itu semakin meneguhkan PMII sebagai organisasi yang punya komitmen tinggi terhadap aspek lain dalam Islam seperti Islam transformatif, demokrasi dan pluralisme.⁴⁰

Senada dengan HMI, kiprah alumni PMII di level nasional semakin banyak. Beberapa mantan ketua Pengurus Besar (PB) PMII meniti karier di politik lewat partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), anggota DPR atau lembaga nasional lainnya. Di level politik diantaranya adalah Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar, Slamet Effendi Yusuf, Maftuh Basuni, Arifin Junaedi, Andi Muarli Sunrawa, Otong Abdurrahman, Ali Masykur Musa dll. Satu hal lain yang menarik adalah bahwa sudah bisa dipastikan bahwa hampir semua pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) saat ini adalah mantan aktivis PMII baik aktivis di tingkat nasional atau di tingkat cabang. Sehingga bisa dikatakan bahwa PMII tidak hanya sebagai basis massa PKB tapi juga sebagai penyedia politisi yang mempunyai loyalitas tinggi.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

IMM adalah organisasi mahasiswa Muslim terakhir yang berdiri di masa Orde Lama. Selang beberapa tahun setelah mahasiswa yang berafiliasi NU memisahkan diri dari HMI, mahasiswa yang berafiliasi ke Muhammadiyah juga memisahkan diri dari HMI. Akhirnya, IMM didirikan di Yogyakarta pada 14 Maret 1964. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi berdirinya IMM. Secara ideologis ditengarai bahwa IMM berdiri karena kekecewaan generasi muda Muhammadiyah terhadap HMI yang kurang konsisten terhadap ideologi modernisnya. Konsep modernis (pembaharuan) merupakan prinsip penting bagi mahasiswa Muhammadiyah karena merupakan prinsip dasar bagi organisasi otonom Muhammadiyah ini. Secara sosiologis, berdirinya IMM juga didorong oleh munculnya banyak perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah. Ketidakpuasan generasi muda Muhammadiyah terhadap ideologi HMI mendorong lahirnya IMM.⁴¹

Faktor sosiologis lain adalah bahwa berdirinya IMM untuk melengkapi keberadaan organisasi generasi muda Muhammadiyah yang sudah berdiri lebih awal, seperti Nasyi'atul Aisyiyah (berdiri 1931), Pemuda Muhammadiyah (berdiri 1932), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (berdiri 1961, dan mulai 2008 berubah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah, IRM). Beberapa tokoh dibalik berdirinya IMM diantaranya adalah Mohammad Djazman, M. Amien Rais, dan A. Rosyad Sholeh.

Berbeda dengan PMII, berdirinya IMM tidak banyak menimbulkan konflik atau friksi di dalam HMI. Secara sosiologis bisa dipahami karena berdirinya IMM tidak diikuti oleh keluarnya para aktivis yang berideologi modernis dari HMI. IMM baru berdiri pada 1964 karena Muhammadiyah masih mempunyai beban moral pada Ikrar Abadi umat Islam pada 1949 yang menyepakati bahwa HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa. Walaupun demikian, berdirinya PMII merupakan "preseden baik" bagi mahasiswa Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi sendiri. Keberadaan IMM lebih merupakan organisasi alternatif bagi mahasiswa berideologi modernis. Di sisi lain, IMM yang dominan di perguruan tinggi-perguruan tinggi Muhammadiyah bukan merupakan ancaman bagi keberadaan HMI. Secara politis, berdirinya IMM bersamaan dengan konfrontasi HMI dengan PKI, bahkan HMI terancam akan dibubarkan oleh rezim Sukarno.⁴²

IMM adalah organisasi mahasiswa Muslim terakhir yang berdiri di masa Orde Lama. IMM didirikan di Yogyakarta pada 14 Maret 1964. IMM berdiri karena kekecewaan generasi muda Muhammadiyah terhadap HMI yang kurang konsisten terhadap ideologi modernisnya. berdirinya IMM juga didorong oleh munculnya banyak perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah. Ketidakpuasan generasi muda Muhammadiyah terhadap ideologi HMI mendorong lahirnya IMM.

Lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). IMM baru berdiri pada 1964 karena Muhammadiyah masih mempunyai beban moral pada Ikrar Abadi umat Islam pada 1949 yang menyepakati bahwa HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa.

Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya



Kegiatan pengurus dewan pimpinan pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. IMM tumbuh dan berkembang secara cepat di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah karena didukung secara struktural oleh Muhammadiyah sebagai organisasi induknya.

Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.



Secara jelas IMM disebutkan dalam Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, PTM (2006) bab XIV pasal 78 bahwa "Organisasi kemahasiswaan yang berdiri di PTM adalah: a) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah; b) Organisasi lain yang diizinkan oleh Pimpinan PTM".

IMM tumbuh dan berkembang secara cepat di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah karena didukung secara struktural oleh Muhammadiyah sebagai organisasi induknya. Walaupun sebagai organisasi otonom yang paling muda dalam Muhammadiyah, IMM bisa bergerak bebas untuk menyebarkan ideologi modernis Muhammadiyah di kalangan akademisi di lingkungan perguruan Muhammadiyah. Secara jelas IMM disebutkan dalam Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, PTM (2006) bab XIV pasal 78 bahwa "Organisasi kemahasiswaan yang berdiri di PTM adalah: a) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah; b) Organisasi lain yang diizinkan oleh Pimpinan PTM". Dalam prakteknya, hanya IMM sebagai LDK resmi di berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah. Ini berarti bahwa organisasi mahasiswa selain IMM di perguruan tinggi Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi ekstra-kampus, sebagaimana juga keberadaan IMM di perguruan tinggi umum lainnya.

Kemunculan IMM dari sisi waktu sangat tepat, ketika Indonesia mendapatkan ancaman ideologis dari PKI. Kondisi ini didukung oleh demokrasi dipimpin Sukarno yang otoriter. Sejarah mencatat bahwa pada periode 1960-an Sukarno condong ke sosialisme-komunisme. Nasakom yang dicanangkan oleh Sukarno saat itu merupakan bukti konkrit kecenderungan ini. Keterlibatan beberapa pimpinan Masyumi dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958 berbuntut pada pembubaran Masyumi pada 1960. HMI yang dianggap sebagai *onderbouw* Masyumi hampir saja kena imbas dari pembubaran

Masyumi. Di sisi lain, keberadaan PKI juga merupakan kekuatan yang sangat signifikan di periode ini. Bahkan PKI memiliki pendukung di level mahasiswa yaitu Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Karena getolnya penolakan HMI terhadap ideologi PKI, maka PKI dan CGMI mengusulkan pada pemerintah untuk membubarkan HMI dengan tuduhan sebagai anteknya DI/TII. Pada saat inilah IMM muncul sebagai pendukung HMI untuk tidak dibubarkan oleh Sukarno.⁴³

Periode Orde Baru awal tidak hanya masa sulit bagi organisasi politik Islam, tapi juga bagi gerakan mahasiswa Islam. Program depolitisasi Orde Baru sejak awal 1970-an telah menciutkan ruang gerak umat Islam tidak hanya di ranah politik, tapi juga di ranah sosial. IMM juga mengalami masa sulit dalam mensikapi kebijakan UU Keormasan yaitu Asas Tunggal Pancasila. Senada dengan organisasi induknya yang akhirnya menerima Pancasila, IMM mengikuti keputusan Mukhtar Muhammadiah ke-41 pada 1985 sebagai strategi dakwah Muhammadiyah. Periode ini dimanfaatkan secara optimal oleh IMM untuk mengembangkan lembaga IMM. Walhasil, pada 1990-an IMM telah berkembang ke hampir semua wilayah khususnya di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah.

Sebagai organisasi sosial di level mahasiswa, IMM juga menaruh perhatian pada isu-isu sosial-politik dan kemanusiaan. Periode Orde Baru secara umum memang telah membungkam berbagai gerakan sosial keagamaan dan juga politik. Namun demikian, ketika peluang politik terbuka, IMM juga berserikat dengan gerakan-gerakan mahasiswa dan kaum intelektual lain menuntut mundurnya Soeharto dalam gerakan reformasi 1997. Sebagai organisasi otonom di bawah Muhammadiyah, IMM juga mendukung gerakan-gerakan politik Muhammadiyah khususnya di ranah politik praktis dan juga aspek-aspek sosial lainnya. Walaupun demikian, sejauh ini belum banyak alumni IMM yang berkiprah di level nasional kecuali beberapa tokoh seperti M. Amien Rais, M. Din Syamsuddin, M. Djazman Al-Kindi.

Berawal dari gerakan *tarbiyah*, kelompok pengajian berskala kecil di kampus-kampus umum di Indonesia sejak 1980-an, gerakan ini di alam keterbukaan masa reformasi menjelma menjadi dua organisasi gerakan yang akan dijelaskan berikut ini, yakni Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

LDK dan KAMMI: Potret Islamis dalam Gerakan Mahasiswa Muslim

Memasuki masa reformasi, Indonesia menyaksikan munculnya gerakan mahasiswa Islam yang secara ideologis beredar dari tiga organisasi gerakan mahasiswa yang telah dijelaskan di atas. Terinspirasi oleh gerakan di Timur Tengah, khususnya Ikhwanul Muslimin di Mesir, gerakan ini mengambil hakuan Islamis, yang mengagendakan penerapan ajaran Islam secara penuh dalam kehidupan sosial-keagamaan dan juga politik kenegaraan. Berawal dari gerakan *tarbiyah*, kelompok pengajian berskala kecil di kampus-kampus umum di Indonesia sejak 1980-an, gerakan ini di alam keterbukaan masa reformasi menjelma menjadi dua organisasi gerakan yang akan dijelaskan berikut ini, yakni Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Lembaga Dakwah Kampus adalah lembaga yang bergerak di bidang dakwah Islam dengan menjadikan kampus sebagai inti kekuatannya. Sedangkan seluruh warga civitas akademika merupakan objek sekaligus subjek dakwahnya.

Lembaga Dakwah Kampus (LDK)

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) adalah sebuah organisasi mahasiswa intra kampus yang terdapat di tiap-tiap perguruan tinggi di Indonesia. Di tiap-tiap kampus, nama LDK bisa berbeda-beda, seperti Seksi Kerohanian Islam, Forum Studi Islam, Lembaga Dakwah Kampus, Badan Kerohanian Islam, dan sebagainya.⁴⁴ Menurut khittahnya, LDK adalah suatu lembaga mahasiswa yang bergerak dalam dakwah Islam di kampus untuk menegakkan kalimah Allah dengan jalan *amar ma'ruf nahi munkar*. Gerakan ini mengkhususkan kegiatan dakwahnya dalam sebuah miniatur masyarakat kecil yang bernama masyarakat kampus, tentu dengan mahasiswa sebagai unsur terpenting.

Sesuai dengan namanya, Lembaga Dakwah Kampus adalah lembaga yang bergerak di bidang dakwah Islam dengan menjadikan kampus sebagai inti kekuatannya. Sedangkan seluruh warga civitas akademika merupakan objek sekaligus subjek dakwahnya. Kondisi objektif masing-masing kampus yang berbeda-beda menyebabkan Lembaga Dakwah Kampus di masing-masing kampus berkembang dengan pola sendiri-sendiri, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. LDK di UGM Yogyakarta misalnya bernama Jamaah Shalahuddin (JS), di ITB bernama Jama'ah Salman, di UI Jakarta bernama Forum Remaja Masjid, di Airlangga Surabaya bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam (UKMKI), di UNHAS Makassar bernama Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM). Bahkan saat ini berkembang LDK di masing-masing fakultas dengan nama berbeda-beda.



LDK Salman ITB. Jamaah Salman ITB adalah LDK yang paling awal berdiri, yaitu pada 30 Mei 1964.
Sumber: Dokumen Salman ITB

LDK ini berdiri pada periode yang berbeda-beda dengan dan kondisi historis yang berbeda pula. Di antara LDK yang ada, Jamaah Salman ITB adalah LDK yang paling awal berdiri, yaitu pada 30 Mei 1964. LDK yang lainnya, Jamaah Sholahuddin UGM berdiri pada 1976 dan UKMKI Unair berdiri pada 30 Maret 1984. Periode 1970-1980 ini bisa dikatakan periode paling berat bagi umat Islam Indonesia karena kebijakan pemerintah Orde Baru yang keras. Sikap mahasiswa mendirikan lembaga dakwah di kampus merupakan keputusan dan strategi yang bagus untuk tetap berdakwah tapi tidak bersinggungan dengan pemerintah. LDK-LDK yang lain berdiri pada periode akhir Orde Baru di mana kondisi politik sudah membaik atau bahkan berdiri setelah era reformasi. Dalam hal ini penulis tidak bisa menjelaskan satu per satu sejarah berdirinya LDK-LDK tersebut.

Secara normatif, tujuan utama dari dakwah kampus adalah mencetak kader-kader muda Muslim yang tangguh dan mengoptimalkan peran kampus dalam upaya mentransformasi masyarakat menuju masyarakat Islami. Untuk mencapai tujuannya, LDK mempunyai beberapa fungsi sebagaimana di bawah ini.⁴⁵ *Pertama*, LDK sebagai media pembinaan umat. Ini merupakan peran utama dan selama ini telah dilaksanakan oleh LDK. Dalam hal ini, LDK memiliki kedudukan strategis mengingat jangkauannya untuk melakukan aktifitas pembinaan umum kepada civitas akademika secara luas dan masyarakat sekitar kampus. *Kedua*, LDK sebagai artikulator. Maksudnya adalah LDK bisa berperan sebagai penyambung aspirasi umat, baik dalam hal menyerukan yang ma'ruf maupun menghilangkan yang munkar. Dalam pelaksanaannya, artikulasi LDK ini (baik lisan, tulisan, ataupun aksi), demi kredibilitas dan daya dorong serta efek yang ditimbulkan, disampaikan dengan menggandeng eksponen dakwah lain, khususnya pers Islam.

Tujuan utama dari dakwah kampus adalah mencetak kader-kader muda Muslim yang tangguh dan mengoptimalkan peran kampus dalam upaya mentransformasi masyarakat menuju masyarakat Islami.

LDK mempunyai beberapa fungsi sebagaimana di bawah ini. Pertama, LDK sebagai media pembinaan umat. Kedua, LDK sebagai artikulator. Ketiga, LDK sebagai mediator. Keempat, LDK sebagai fasilitator. LDK-LDK disatukan dalam sebuah forum koordinasi. Forum ini merupakan salah satu bentuk koordinasi dakwah yang berfungsi sebagai sarana mensinergikan gerakan dakwah menuju ummatan wahidah.

Ketiga, LDK sebagai mediator. Dengan akses yang dimiliki, LDK dapat berperan sebagai mediator antara umat pada satu pihak, dan pengambil keputusan di pihak lain. Terkadang aspirasi umat macet disebabkan tidak sampainya kepada pihak yang berkompeten; sementara terdapat kebijakan pemerintah yang tidak populer di kalangan umat karena kurang pengertian terhadap aspirasi umat. Dalam konteks ini, peran mediasi (*cultural and political broker*) menjadi penting artinya. *Keempat*, LDK sebagai fasilitator. Dengan ide, akses, fasilitas yang dimiliki, LDK dapat berperan sebagai fasilitator dalam berbagai kegiatan demi tercapainya aspirasi umat, baik dalam kegiatan artikulasi, mediasi, ataupun aksi.

LDK-LDK yang banyak tumbuh dan berkembang di banyak universitas dan kota itu disatukan dalam sebuah forum koordinasi. Kesibukan masing-masing lembaga dalam berdakwah di lingkungan masing-masing menjadikan mereka kurang optimal dalam berdakwah secara makro. Oleh karena itu dibentuklah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Forum ini merupakan salah satu bentuk koordinasi dakwah yang berfungsi sebagai sarana mensinergikan gerakan dakwah menuju *ummatan wahidah*. Pada awalnya, FSLDK diberi nama sarasehan LDK. Kegiatan ini diselenggarakan pertama kali oleh Jamaah Shalahuddin UGM pada 24-25 Mei 1986 yang dihadiri oleh 13 LDK se-Jawa, Sarasehan LDK pertama ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:⁴⁶

1. Perlunya meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara Lembaga Dakwah Kampus, setidaknya-tidaknya antar fungsionaris Lembaga Dakwah Kampus.
2. Disepakati untuk melanjutkan komunikasi dan koordinasi antar LDK dengan pembagian wilayah: a) wilayah bagian barat, dikoordinasi Karisma Salman ITB, b) wilayah bagian tengah dikoordinasi Jamaah Shalahuddin UGM, c) wilayah bagian timur dikoordinasi UKKI Unair.

Pertemuan pertama tersebut kemudian diikuti pertemuan-pertemuan berikutnya berturut-turut diadakan di Salman ITB Bandung pada 2-4 Januari 1987, di Unair Surabaya pada 13-16 September 1987, di UNS Solo pada tanggal 3-6 September 1988, dan di IKIP Malang pada tanggal 15-19 September 1989. Pada pertemuan ke-5 di IKIP Malang, FSLDK menginjak tahapan penting karena dihadiri oleh peserta LDK perguruan tinggi-perguruan tinggi di luar Jawa seperti dari Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Tahapan penting lainnya adalah disepakatinya rumusan khittah LDK sebagai garis perjuangan LDK yang berisi arah, tujuan, dan sasaran dakwah di kampus. Khittah ini bertujuan menyamakan pemahaman terhadap arah dakwah di kampus dan FSLDK sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi global dakwah di Indonesia. Saat ini forum ini lebih populer dengan sebutan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia (FSLDKI).

Berbeda dengan organisasi Islam kampus lainnya, organisasi Islam kampus ini dianggap sebagai organisasi resmi universitas atau perguruan tinggi. Walaupun dengan nama yang berbeda-beda, LDK dianggap sebagai lembaga dakwah yang paling mempunyai otoritas untuk mengembangkan dakwah di kampus. Sedangkan lembaga-lembaga lainnya dianggap sebagai organisasi dakwah ekstra-kampus. Sebagai organisasi resmi universitas, maka LDK biasanya mendapatkan fasilitas untuk menggunakan masjid kampus sebagai basis kegiatannya. Walaupun sebagai organisasi Islam resmi kampus, LDK mempunyai warna yang berbeda-beda di masing-masing universitas. Yang menyamakan mereka adalah bahwa mereka adalah lembaga dakwah, beda dengan HMI atau PMII yang mungkin kurang pas dikatakan sebagai lembaga dakwah.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Reformasi 1998 laksana kran yang membuka semua jalur-jalur birokrasi dan juga politik. Dalam teori sosial, momen ini disebut dengan struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*). Dalam kondisi ini simpul-simpul dan segala kebuntuan politik terbuka, sehingga memungkinkan semua segmen masyarakat Indonesia untuk mengekspresikan aspirasi sosial dan politiknya. Periode ini kemudian ditandai dengan munculnya berbagai partai-partai politik termasuk partai Islam. Berbagai gerakan sosial juga muncul, termasuk di segmen mahasiswa Muslim kampus yang menyelenggarakan FSLDK di Malang pada 29 Maret 1998. Forum ini akhirnya membentuk sebuah lembaga alternatif bagi mahasiswa yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Keputusan ini kemudian dituangkan dalam naskah pendirian yang disebut Deklarasi Malang.⁴⁷

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pembentukan KAMMI oleh para aktivis dakwah kampus ini adalah: 1) adanya indikasi yang mematikan potensi bangsa; 2) urgensi sebuah tuntutan reformasi; 3) adanya kepentingan umat Islam untuk segera berbuat; 4) aksi demonstrasi dan mimbar bebas semakin menjamur; 5) mahasiswa Islam merupakan elemen sosial; 6) suara umat Islam mulai terabaikan; 7) depolitisasi kampus memandulkan peran mahasiswa.

Pemilihan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kemudian disingkat KAMMI bagi gerakan ini mengandung makna sekaligus memiliki beberapa konsekwensi, yaitu:

1. KAMMI adalah sebuah kekuatan terorganisir yang menghimpun berbagai elemen mahasiswa.
2. Muslim baik perorangan maupun lembaga yang sepakat bekerja dalam format bersama KAMMI.

Berbagai gerakan sosial juga muncul, termasuk di segmen mahasiswa Muslim kampus yang menyelenggarakan FSLDK di Malang pada 29 Maret 1998. Forum ini akhirnya membentuk sebuah lembaga alternatif bagi mahasiswa yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Keputusan ini kemudian dituangkan dalam naskah pendirian yang disebut Deklarasi Malang.

3. KAMMI adalah sebuah gerakan yang berorientasi kepada aksi riil dan sistematis yang dilandasi gagasan konsepsional yang matang mengenai reformasi dan pembentukan masyarakat Islami (berperadaban).
4. Kekuatan inti KAMMI adalah kalangan mahasiswa pada berbagai stratanya yang memiliki komitmen perjuangan keislaman dan kebangsaan yang jelas dan benar.
5. Visi gerakan KAMMI dilandasi pemahaman akan realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kemajemukannya, sehingga KAMMI akan bekerja untuk kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, bangsa dan tanah air Indonesia.⁴⁸

Berbeda dari penampilan beberapa organisasi kemahasiswaan Islam lain yang sudah ada sebelumnya, kehadiran KAMMI seakan-akan mewakili sebuah spirit "Islam baru" yang mencerminkan "totalitas", baik dalam tujuan perjuangan maupun dari segi perilaku politik sosialnya. Dengan kata lain, KAMMI terlihat betul-betul ingin merefleksikan sebuah potret generasi muda Islam yang ideal, sebagai generasi yang shaleh, menjunjung tinggi moralitas Islam dalam berbagai aspek kehidupan (*kaffah*).

Di usianya yang masih relatif muda, popularitas KAMMI cukup mengagumkan. Bahkan, karena kuatnya ruh Islam yang dipegangnya, organisasi ini mampu menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi kalangan mahasiswa di kampus-kampus besar seperti UI, ITB, UGM, dan Unair. Bahkan, di kampus-kampus berlabelkan Islam pun seperti UIN atau IAIN, organisasi KAMMI berkembang dengan baik khususnya di fakultas-fakultas ilmu pasti (eksakta) seperti MIPA, kimia, fisika, matematika. Hal ini tampaknya sesuai dengan status KAMMI sebagai organisasi ekstra kampus yang menghimpun mahasiswa Muslim seluruh Indonesia secara lintas sektoral, suku, ras dan golongan. KAMMI menghimpun segenap mahasiswa Muslim Indonesia yang bersedia bekerjasama membangun negara dan bangsa Indonesia. Karena itu wajar jika dalam perjuangannya, KAMMI berusaha merangkul seluruh elemen mahasiswa dari berbagai kampus, baik di wilayah barat maupun wilayah timur Indonesia.⁴⁹

Visi perjuangan KAMMI adalah menjadi wadah perjuangan yang akan melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia.

Visi perjuangan KAMMI adalah menjadi wadah perjuangan yang akan melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa agenda yang dilakukan KAMMI. *Pertama*, membina keislaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa Muslim Indonesia; *kedua*, menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi intelektual, sosial, dan politik mahasiswa; *ketiga*, mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani dan madani; *keempat*, memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia

dalam menyelesaikan permasalahan kerakyatan dan kebangsaan; dan *kelima*, kerjasama antar elemen masyarakat dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).⁵⁰

Selain itu, KAMMI berperan sebagai wadah dan mitra bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran dalam wadah negara hukum Indonesia melalui tahapan pembangunan nasional yang sehat dan bertanggung jawab. KAMMI juga mengambil peran sebagai mitra bagi masyarakat dalam upaya-upaya pembangunan masyarakat sipil, demokratisasi, dan pembangunan kesatuan/persaudaraan ummat dan bangsa melalui pendampingan/advokasi sosial, kritis/konstruktif terhadap kebijakan negara yang memarginalisasi masyarakat. Sehubungan dengan itu, ada beberapa prinsip yang menjadi acuan gerakan dakwah KAMMI, yaitu: kemenangan Islam sebagai jiwa perjuangan; kebatilan sebagai musuh abadi; solusi Islam sebagai tawaran perjuangan; perbaikan sebagai tradisi perjuangan; kepemimpinan ummah sebagai strategi perjuangan; dan persaudaraan sebagai watak mu'amalah KAMMI.⁵¹

Hampir mirip dengan LDK, KAMMI juga lebih dikenal sebagai lembaga tarbiyah. Sistem kaderisasi yang ketat dan berjenjang inilah yang menjadikan lembaga Islam kampus ini berbeda dengan organisasi Islam kampus lainnya seperti HMI, PMII atau IMM. Pola dakwah KAMMI inilah yang dianggap sebagai terobosan terhadap pola dakwah yang lama seperti pola ceramah atau klasikal seperti pola kaderisasi HMI atau PMII. Sistem tarbiyah inilah yang menghasilkan kader-kader yang tidak hanya memiliki komitmen agama yang kuat tapi juga solidaritas antar anggota yang tinggi.

Terakhir, nasionalisme dan aktivisme politik KAMMI juga pantas dibahas di sini. Walaupun belum pernah berhadapan dengan peristiwa yang menguji nasionalisme mereka seperti kasus Asas Tunggal pada HMI, PMII, dan IMM, bukan berarti tidak mempunyai komitmen nasionalisme. Sebagai organisasi yang berdiri di akhir masa Orde Baru, munculnya KAMMI menyiratkan komitmen para pendirinya pada kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, KAMMI juga memahami demokrasi sebagai mekanisme politik yang diyakininya. Itu semua menyiratkan komitmen KAMMI terhadap kebangsaan Indonesia yang kuat.

Gerakan Islam Kampus dalam Perspektif Perbandingan

Secara umum, gerakan Islam kampus bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu gerakan “asli” Indonesia dan pengaruh Islam trans-nasional. Gerakan mahasiswa seperti HMI, PMII, dan IMM merupakan gerakan Islam yang memiliki akar kuat dalam sejarah Indonesia. Sementara gerakan Islam kampus LDK dan KAMMI dalam banyak hal dipengaruhi gerakan Islam di Timur Tengah, khususnya Ikhwanu Muslimin di Mesir. Perbedaan ini berpengaruh secara signifikan pada pemikiran keagamaan dan ideologi.

Bagan berikut ini akan membahas kedua kelompok gerakan mahasiswa Islam di atas dalam perspektif perbandingan satu sama lain. Untuk itu, beberapa isu berikut ini diambil sebagai dasar perbandingan, mulai dari pemikiran keagamaan hingga strategi gerakan dan rekrutmen anggota.

Pemikiran Keagamaan dan Gerakan

Secara umum, gerakan Islam kampus bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu gerakan “asli” Indonesia dan pengaruh Islam trans-nasional. Gerakan mahasiswa seperti HMI, PMII, dan IMM merupakan gerakan Islam yang memiliki akar kuat dalam sejarah Indonesia. Sementara gerakan Islam kampus LDK dan KAMMI dalam banyak hal dipengaruhi gerakan Islam di Timur Tengah, khususnya Ikhwanu Muslimin di Mesir. Perbedaan ini berpengaruh secara signifikan pada pemikiran keagamaan dan ideologi.

Dua gerakan Islam kampus pertama, HMI dan IMM, mewarisi gerakan Islam modernis, sementara PMII jelas berafiliasi dengan NU yang disebut kelompok tradisional. Meski demikian, suasana kampus di perkotaan kerap kali membuat hubungan ketiga gerakan mahasiswa di atas relative cair, dan karenanya penulis menengarai bahwa identitas Islam Indonesia lebih dominan pada tiga gerakan tersebut daripada gerakan Islam kampus lainnya, yakni LDK dan KAMMI, yang banyak dipengaruhi gerakan atau ideologi Islam trans-nasional.

Peta keanggotaan gerakan Islam kampus bervariasi, tergantung pada kampusnya; di universitas umum LDK dan KAMMI lebih dominan, di UIN HMI dan PMII lebih dominan, sedangkan di kampus-kampus Muhammadiyah IMM yang lebih dominan. Meski demikian, banyak aktivis LDK dan KAMMI berlatarbelakang Muhammadiyah dan NU.

Sejak awal Orde Baru, Islam ala Timur Tengah, disebut salafisme, berpengaruh kuat di Indonesia. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pimpinan M. Natsir telah “memboyong” ideologi salafisme Wahhabi ke Indonesia sejak 1967.⁵² Banyak mahasiswa Indonesia yang dikirim oleh DDII untuk kuliah di Timur Tengah dan banyak juga mahasiswa Indonesia kuliah di perwakilan Universitas Imam Ibnu Sa’ud di Indonesia, yaitu di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). Pengaruh Wahhabisme tidak hanya bagi masyarakat umum tapi juga di universitas, yang mengambil bentuk gerakan Islam kampus. Alumni universitas di Timur Tengah dan LIPIA mulai muncul dan berpengaruh di kampus-kampus sejak 1980-an. Sebagian dari mereka juga membawa pengaruh gerakan Islam di Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin (IM). Oleh karena itu, buku-buku karya tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb banyak membajiri Indonesia pada tahun 1980-an dan akhirnya berpengaruh terutama terhadap gerakan Islam kampus.⁵³ Metode pendidikan kader tarbiyah ala Ikhwanul Muslimin adalah pengaruh paling signifikan dalam sistem kaderisasi lembaga dakwah kampus pada tahun 1980-an hingga awal 1990-an.

Berkaitan dengan perkembangan salafisme di Indonesia, perlu ditekankan bahwa pemikiran salafisme di Indonesia ada beberapa corak, di antaranya adalah salafi Wahhabi dan salafi Ikhwani, dan Salafi Puris. Salafi Wahhabi adalah pemahaman yang bersumber pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi Arabia, sedangkan Salafi Ikhwani bersumber pada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kategori Salafi Puris adalah pemahaman yang bersumber pada Salafi di Yaman yang kurang memandang aspek politik sebagai perhatian mereka.

Secara umum, pemahaman keagamaan Islam (ideologi) LDK dan KAMMI hampir sama, yaitu bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Ideologi inilah yang membawa pemahaman dua gerakan terakhir ini pada ini aspek politik sehingga mereka juga sering disebut sebagai gerakan Islamisme. Berbeda dengan gerakan Salafi Puris yang tidak mau terlibat di ranah politik, kedua gerakan Islam kampus kontemporer ini menganggap ranah politik sebagai bagian metode perjuangan Islam. Walaupun gerakan LDK sejauh ini tidak mempunyai afiliasi dengan partai Islam, namun mereka tetap melihat partai politik sebagai ranah yang signifikan untuk memperjuangkan Islam. Gerakan KAMMI sejak awal memang berafiliasi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bahkan sebagai pemasok aktivis partai Islamis tersebut.

Berbeda dengan gerakan Salafi Puris yang tidak mau terlibat di ranah politik, LDK dan KAMMI menganggap ranah politik sebagai bagian metode perjuangan Islam. Walaupun gerakan LDK sejauh ini tidak mempunyai afiliasi dengan partai Islam, namun mereka tetap melihat partai politik sebagai ranah yang signifikan untuk memperjuangkan Islam. Gerakan KAMMI sejak awal memang berafiliasi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bahkan sebagai pemasok aktivis partai Islamis tersebut.

Penampilan Sosial Keagamaan

Di samping pemikiran keagamaan, perbedaan gerakan kampus juga bisa dilihat dari corak penampilan mereka. Masalah pakaian, misalnya, aktivis HMI, IMM dan PMII lebih banyak mengkomodifikasi pakaian Islam Indonesia, sedangkan gerakan LDK dan KAMMI lebih banyak mengkomodifikasi pakaian ala Timur Tengah. Aktivis perempuan HMI dan PMII pada tahun 1960-an dan 1970-an belum banyak yang menggunakan hijab sebagaimana banyak digunakan aktivis HMI dan PMII saat ini. Perubahan pemahaman Islam dalam HMI dan PMII juga mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan maraknya pengaruh Islam global di Indonesia.

Hal penting lain untuk dibahas adalah bagaimana aktivis gerakan ini memahami dan mengaplikasikan konsep jilbab dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini jelas membedakan LDK dan KAMMI dengan gerakan Islam lainnya, HMI, PMII, dan IMM. Jilbab sebagai identitas wanita Muslimah sama-sama digunakan oleh semua aktivis wanita, tapi corak jilbab yang digunakan aktivis LDK dan KAMMI lebih besar (jilbaber, *beggy*) daripada jilbab yang pada umum dipakai aktivis gerakan HMI, PMII, atau IMM. Fenomena lain yang membedakan aktivis putri LDK dan KAMMI adalah bahwa mereka hampir bisa dipastikan tidak pernah memakai celana panjang atau jeans, tapi menggunakan kain panjang (rok).

Masih terkait penampilan fisik, aktivis LDK dan KAMMI, khususnya laki-laki, meyakini bahwa memelihara jenggot adalah bagian dari sunnah nabi dan juga sebagai bagian dari identitas Muslim. Hal ini kurang nampak pada aktivis gerakan Islam lainnya. Dalam hal *isbal* (celana panjang yang menutupi mata kaki), para aktivis Islam gerakan kampus mensikapi berbeda dengan orang salafi. Mayoritas aktivis gerakan Islam kampus memakai celana panjang yang menutupi mata kaki (*isbal*) dalam kehidupan sehari-hari, tapi menjaga *isbal* (tidak memanjangkan celana) hanya ketika sholat.

Terakhir, perilaku sosial keagamaan aktivis gerakan Islam kampus juga bisa dilihat dari solidaritas sosial mereka. Sebagai mahasiswa yang cepat dan tanggap pada persoalan kemanusiaan, hampir semua gerakan Islam kampus mempunyai program-program sosial. Tidak jarang gerakan mahasiswa ini terlibat dalam bakti sosial di tengah masyarakat. Departemen kaderisasi LDK dan KAMMI juga banyak melakukan aktivitas dakwah dan bakti sosial mereka di desa tertentu dengan istilah desa binaan. Berdasarkan pengamatan peneliti di wilayah Yogyakarta, LDK dan KAMMI cukup aktif dalam berbagai kegiatan dalam membantu masyarakat Bantul yang terkena musibah gempa tahun 2006 dan juga erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Dalam hal ini, nampaknya HMI, PMII, dan IMM agak berbeda. Walaupun tidak bisa dikatakan pasif, mereka kurang aktif dan responsif dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.

Keanggotaan dan Strategi Pergerakan

Peta keanggotaan gerakan Islam kampus bervariasi, tergantung pada kampusnya; di universitas umum LDK dan KAMMI lebih dominan, di UIN HMI dan PMII lebih dominan, sedangkan di kampus-kampus Muhammadiyah IMM yang lebih dominan. Meski demikian, banyak aktivis LDK dan KAMMI berlatarbelakang Muhammadiyah dan NU. Beberapa kasus “konflik” antara Muhammadiyah dan PKS di beberapa wilayah membuktikan hal ini. Muhammadiyah “kecolongan” kader-kadernya karena banyak dari mereka yang aktif di KAMMI atau PKS.

Sistem kaderisasi HMI, PMII, dan IMM diadakan sekali atau dua kali setahun dengan nama Basic Training untuk HMI, Latihan Kepemimpinan Dasar untuk PMII, atau Baitul Arqom untuk IMM. Bedanya adalah bahwa *dauroh* dan Baitul Arqom lebih menekankan pada pendidikan agama Islam, sedangkan Basic Training dan Latihan Kepemimpinan Dasar lebih menekankan pada *capacity building*.

Keanggotaan sebuah gerakan Islam sangat dipengaruhi oleh strategi dakwah atau metode rekrutmen anggotanya. Berdasarkan survei peneliti di Yogyakarta, mayoritas anggota tertarik pada gerakan Islam karena ideologi dan aktivitas sosialnya. Mayoritas aktivis LDK dan KAMMI merasa bahwa sistem kaderisasi dalam organisasi mahasiswa ini cukup efektif, khususnya metode dakwah dan visi organisasi. Baik LDK maupun KAMMI menggunakan metode tarbiyah sebagai sistem kaderisasi untuk merekrut anggota baru. Sistem tarbiyah adalah sistem kaderisasi yang diadakan secara rutin mingguan dengan peserta terbatas dan diadakan secara berjenjang. Sistem kaderisasi HMI, PMII, dan IMM diadakan sekali atau dua kali setahun dengan nama Basic Training untuk HMI, Latihan Kepemimpinan Dasar untuk PMII, atau Baitul Arqom untuk IMM. Bedanya

adalah bahwa dauroh dan Baitul Arqom lebih menekankan pada pendidikan agama Islam, sedangkan Basic Training dan Latihan Kepemimpinan Dasar lebih menekankan pada *capacity building*. Semua jenis kaderisasi gerakan mahasiswa itu memanfaatkan momentum tahun ajaran baru untuk merekrut anggota-anggota baru. Selain itu, momentum lain yang banyak diminati dan melibatkan banyak anggota baru adalah Ramadhan di Kampus (RDK) yang banyak digelar di berbagai kampus.

Untuk menjaga konsistensi dakwah dan anggota, beberapa gerakan Islam kampus menggunakan berbagai media. Sebagian mengadakan kegiatan seperti kajian rutin, menerbitkan buletin mingguan, atau menggunakan media informasi dan teknologi seperti SMS atau facebook untuk media silaturahmi anggota. Selain itu, beberapa gerakan memanfaatkan blog dan website untuk media dakwah dan silaturahmi antar anggota.

Perlu ditegaskan bahwa rekrutmen anggota dan strategi pergerakan berkaitan erat dengan bagaimana gerakan Islam tersebut memenangkan “perang” opini dengan berbagai gerakan Islam lain. Dalam gerakan sosial, proses inilah yang dikenal dengan istilah *framing*. Proses *framing* bisa dilakukan dengan berbagai media, baik di ruang diskusi, pamphlet, tabloid, atau di forum-forum informal.⁵⁴

Problem-problem sosial yang dekat dengan mahasiswa seperti ketidakadilan sosial, korupsi, supremasi hukum, hak asasi manusia merupakan isu yang cukup signifikan dalam strategi dakwah. Gerakan Islam kampus yang mempunyai idealisme sekaligus pragmatis karena memberikan solusi alternatif pada problem-problem sosial akan lebih diminati oleh lebih banyak mahasiswa.



Bendera Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.

Selain itu, aspek normatif-kognitif juga signifikan dalam rekrutmen anggota. Berdasarkan survei di beberapa gerakan Islam kampus, mahasiswa tertarik untuk terlibat dalam gerakan Islam tidak hanya untuk memperdalam ilmu agama, tapi juga untuk *capacity building* seperti untuk pembentukan karakter, menemukan potensi diri, dan juga sebagai proses pendewasaan diri. Aspek-aspek di atas diperhatikan oleh berbagai gerakan Islam kampus sehingga mereka menjadi organisasi alternatif bagi mahasiswa.

Isu-isu Sentral Perjuangan

Gerakan-gerakan Islam kampus tidak bisa dilepaskan dari isu-isu kontemporer ketika Islam berhadapan dengan modernitas. Di antara isu-isu yang akan dibahas dalam sub-bab ini adalah syari'ah, Khilafah Islamiyah, demokrasi, dan pluralisme.

Gerakan Islam di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sangat beragam karena memang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Keragaman gerakan juga karena mereka masing-masing *concern* dalam mensikapi berbagai masalah yang muncul di lingkungan kampus dan masyarakat. Oleh karena itu, gerakan-gerakan Islam kampus tersebut tidak bisa dilepaskan dari isu-isu kontemporer ketika Islam berhadapan dengan modernitas. Di antara isu-isu yang akan dibahas dalam sub-bab ini adalah syari'ah, Khilafah Islamiyah, demokrasi, dan pluralisme.

Walaupun syari'ah sudah ramai dibicarakan orang sejak masa refrmasi, tetapi konsep itu tampaknya belum dipahami dengan baik oleh mahasiswa, termasuk aktifis gerakan kampus. LDK dan KAMMI secara umum mendukung konsep Syariah, namun mereka tidak mengetahui secara pasti bagaimana aplikasi Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini aktivis gerakan Islam kampus lebih memahami konsep Syari'ah secara *taken for granted* karena sejak awal mereka memahami Islam sebagai agama yang *kaffah*. Bagi mereka, syari'ah lebih dimaknai sebagai formalisasi hukum-hukum Islam. Bahkan beberapa gerakan menginginkan syariatisasi kampus, walaupun mereka tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep tersebut.

Senada dengan Syariah, konsep Khilafah Islamiyah juga tidak dipahami secara jelas oleh beberapa gerakan Islam kampus. Walaupun beberapa aktivis LDK dan KAMMI mendukung konsep ini, mereka tidak cukup mempunyai konsep bagaimana *roadmap* menuju Khilafah Islamiyah. Mereka memahami bahwa konsep ini baik karena pemahaman normatif mereka terhadap Islam.

Konsep demokrasi dan pluralisme sebetulnya bernasib tidak jauh berbeda dengan konsep Syari'ah dan Khilafah Islamiyah. Walaupun konsep ini adalah produk Barat, namun karena mahasiswa sudah sering mendengarkan konsep ini maka resistensi terhadap konsep ini tidak cukup kuat. Mayoritas aktivis LDK dan KAMMI di beberapa kampus di Yogyakarta tidak secara frontal menolak

konsep ini, namun mereka cenderung mengatakan tidak apa-apa sejauh tidak bertentangan dengan Islam. Beberapa aktivis lain malah meyakini bahwa melalui demokrasi maka syari'ah dan Khilafah Islamiyah bisa terwujud.

Adapun aktivis HMI, PMII, dan IMM sangat beragam dalam memahami berbagai konsep di atas. Walaupun beberapa aktivis menyatakan dukungannya pada konsep Syari'ah dan Khilafah Islamiyah, secara umum mereka kurang sepakat dengan konsep yang menurut mereka masih belum jelas dan tidak aplikatif. Senada dengan aktivis gerakan lainnya, aktivis HMI, PMII, dan IMM secara umum tidak menolak konsep-konsep Barat seperti demokrasi dan pluralisme. Se jauh peneliti perhatikan, mahasiswa cenderung melihat demokrasi dan pluralisme sebagai konsep politik dan sosial yang netral dan tidak ada muatan ideologis apalagi bertentangan dengan ideologi Islam.

Kampus sebagai Basis Gerakan

Gerakan Islam cukup marak berkembang tidak hanya di masyarakat umum tapi juga di kalangan mahasiswa kampus. Islam berkembang secara luas di Indonesia sudah sejak abad ke-13 atau bahkan sebelumnya. Corak Islam yang sudah mengalami akulturasi budaya inilah yang kemudian bisa dinamakan Islam Indonesia yang secara ideologis cukup moderat. Perkembangan Islam di Indonesia mengalami eskalasi sejak Wahhabi mengintensifkan dakwah di Asia Tenggara untuk membendung pengaruh Syiah. Islam yang terakhir inilah yang mempunyai corak Islam yang berbeda yang bisa dinamakan Islam ala Timur Tengah yang secara ideologis relatif konservatif. Ragam corak keberagamaan ini juga berpengaruh pada gerakan Islam kampus. Secara umum gerakan Islam kampus muncul dalam dua periode, yaitu periode awal kemerdekaan Indonesia dan pertengahan Orde Baru.

Semangat nasionalisme menjadi isu signifikan yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan Islam kampus di periode awal kemerdekaan Indonesia. Gerakan Islam kampus yang muncul sebelum dan sesudah kemerdekaan karena situasi sosial politik adalah JIB, HMI, PMII, dan IMM. Walaupun JIB sudah tidak eksis lagi, beberapa pengamat menengarai bahwa HMI mewarisi semangat Islam JIB baik secara ideologis maupun politis. Latar belakang politis yang cukup kental inilah yang kemudian juga membentuk karakteristik gerakan-gerakan Islam kampus tersebut kental dengan nuansa politiknya.

Periode kedua munculnya gerakan dakwah Islam di kampus adalah pada pertengahan Orde Baru. Islam konservatif ala Wahhabi yang dibawa oleh alumni-alumni Timur Tengah yang dikirim oleh DDII mulai muncul pada awal 1980-an. Seiring dengan politik Islam rezim Soeharto yang cukup represif terhadap umat

Corak Islam yang sudah mengalami akulturasi budaya inilah yang kemudian bisa dinamakan Islam Indonesia yang secara ideologis cukup moderat. Perkembangan Islam di Indonesia mengalami eskalasi sejak Wahhabi mengintensifkan dakwah di Asia Tenggara untuk membendung pengaruh Syiah. Ragam corak keberagamaan ini juga berpengaruh pada gerakan Islam kampus. Secara umum gerakan Islam kampus muncul dalam dua periode, yaitu periode awal kemerdekaan Indonesia dan pertengahan Orde Baru.

Islam, gerakan Islam kampus tumbuh berkembang. Fase ini ditandai dengan munculnya generasi baru yang menjadikan musholla-masjid kampus sebagai basis dakwah mereka. Mereka dikenal dengan sebutan kelompok tarbiyah yang banyak mengambil inspirasi gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pada periode ini sebenarnya mulai muncul juga gerakan mahasiswa yang berafiliasi ke Hizbut Tahrir. Namun gerakan mahasiswa yang terakhir ini kurang berkembang secara signifikan di kampus-kampus.

Gedung Menara Dakwah DDII. Kegiatan dakwah DDII adalah mendirikan masjid, menerbitkan majalah, dan yang paling signifikan adalah memberikan beasiswa mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk belajar di Timur Tengah.

Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.



Selain faktor lokal, maraknya gerakan Islam terutama dalam dua dekade terakhir dipengaruhi oleh faktor global. Tidak disangkal bahwa gerakan-gerakan Islam yang muncul di era reformasi merupakan fenomena global yang muncul di berbagai negara. Arus globalisasi telah mempercepat penyebaran paham/ideologi Islam trans-nasional.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) berperan dalam membawa ideologi Salafisme-Wahhabi tidak hanya di Indonesia. Untuk mengembangkan pengaruh Wahhabi dan juga untuk membendung pengaruh Syiah di Indonesia, berbagai organisasi Islam di Timur Tengah memberikan dana besar-besaran untuk mengembangkan dakwah Islam. Di antara kegiatan dakwah DDII adalah mendirikan masjid, menerbitkan majalah, dan yang paling signifikan adalah memberikan beasiswa mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk belajar di Timur Tengah. Beberapa tahun kemudian, alumni Timur-Tengah inilah yang punya pengaruh signifikan terhadap menyebarnya paham Wahhabisme di Indonesia, termasuk di kampus-kampus. Bagi DDII, lini dakwah Islam yang signifikan di Indonesia ada tiga, yaitu: pesantren, kampus dan masjid. Gagasan ini merupakan visi M. Natsir, pendiri DDII, yang mengatakan “kalau dulu kita dakwah di jalur politik, sekarang kita berpolitik di jalur dakwah.”⁵⁵

Terakhir, berkembangnya gerakan Islam di beberapa kampus di Indonesia tentu tidak terlepas dari kondisi psikologis

mahasiswa, yang sarat akan idealisme, suka berpihak pada suatu hal yang diyakini kebenarannya. Tidak jarang mahasiswa gigih dalam memperjuangkan keyakinannya. Pada umumnya, mahasiswa tidak menyukai kemapanan (*status quo*), karena itu sama artinya dengan kemunduran sehingga tidak sesuai dengan dorongan jiwa mudanya yang penuh gejala idealisme dan progresivitas.

Berbagai gerakan Islam kampus yang menjadi objek penelitian ini bisa dikategorikan menjadi dua gerakan, Gerakan Islam Kampus dan Gerakan Dakwah Kampus. Pertama, Gerakan Islam Kampus adalah gerakan yang berdiri pada periode Orde Lama dan awal Orde Baru yang meliputi HMI, PMII, dan IMM. Berbeda dengan gerakan lain, gerakan-gerakan mahasiswa ini berdiri karena disebabkan faktor politik dan semangat nasionalisme yang tinggi. Begitu pula berbeda dengan gerakan Islam lainnya, gerakan-gerakan ini mempunyai beberapa karakteristik seperti: berideologi moderat, kegiatan lebih fokus ke *capacity building* mahasiswa, aktivitas dakwah sedikit dan lebih cenderung internal, kegiatan di masyarakat relatif sedikit.

Kedua, gerakan mahasiswa kampus yang muncul masa periode Orde Baru dan era reformasi, LDK dan KAMMI, lebih tepat dinamakan Gerakan Dakwah Kampus. Walaupun mungkin ada aspek politik dalam proses berdirinya, tapi gerakan-gerakan mahasiswa ini lebih banyak dipengaruhi oleh semangat Islam yang tinggi karena pengaruh Islam dari Timur Tengah. Gerakan Islam LDK dan KAMMI di antaranya mempunyai karakteristik seperti: berideologi konservatif, kegiatan lebih fokus ke dakwah dan juga *capacity building* yang mengarah pada dakwah, kegiatan dakwah di civitas kampus dan juga di masyarakat umum.

Berbagai gerakan Islam kampus yang menjadi objek penelitian ini bisa dikategorikan menjadi dua gerakan, Gerakan Islam Kampus dan Gerakan Dakwah Kampus. Pertama, Gerakan Islam Kampus adalah gerakan yang berdiri pada periode Orde Lama dan awal Orde Baru yang meliputi HMI, PMII, dan IMM. Kedua, gerakan mahasiswa kampus yang muncul masa periode Orde Baru dan era reformasi, LDK dan KAMMI, lebih tepat dinamakan Gerakan Dakwah Kampus.

Penutup

Walaupun memiliki ideologi dan idealisme yang relatif berbeda, gerakan Islam kampus dalam banyak hal memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan terutama terlihat pada semangat nasionalismenya. Secara umum semua gerakan mahasiswa tersebut mendorong demokratisasi di Indonesia, dan juga ikut mensosialisasikan nilai-nilai modernitas seperti pluralisme dan multikulturalisme. Isu-isu seputar Islamisme seperti Syariah Islam, Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah sangat jarang terdengar di kampus kecuali oleh gerakan berskala kecil seperti HTI.

Terakhir, gerakan Islam di perguruan tinggi umum atau sekuler cenderung lebih Islamis dibanding di perguruan tinggi agama. Fenomena ini terlihat dengan jelas tidak hanya dari sisi pakaian, tapi juga dari pemilihan gerakan Islamnya. Di perguruan tinggi umum, gerakan LDK dan KAMMI lebih disukai oleh mahasiswa daripada gerakan HMI, PMII, dan IMM. Sebaliknya, perguruan tinggi negeri agama seperti UIN atau IAIN, HMI dan PMII yang lebih dominan, kecuali di perguruan tinggi Muhammadiyah dimana IMM yang dominan.

Muhammad Wildan

Endnotes

- 1 Barry McLaughlin, *Studies in Social Movements: a Social Psychological Perspective*. (New York: The Free Press, 1969), hal.75.
- 2 Ted Roberr Gur, *Why Men Rebel*. (New Jersey: Princeton University Press, 1970), hal. 24.
- 3 George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, edisi ke-6, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 394.
- 4 Ridwan Saidi, *Islam dan Nasionalisme Indonesia: Mengungkap deokumen sangat eksklusif 1920 s/d 1950-an tentang pemikiran Islam mengenai masalah kebangsaan*, (Jakarta: LSIP, 1995), hal.2.
- 5 Satu-satunya organisasi mahasiswa yang mendukung isu Khilafah Islamiyah adalah Hizbut Tahir (HTI) Chapter Kampus. Karena minimnya respon mahasiswa terhadap HTI, maka gerakan mahasiswa ini tidak akan dibahas secara khusus, tapi hanya disinggung diberberapa bagian tertentu saja.
- 6 Sidney Tarrow, *Power in movement: social movements and contentious Politics*, second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hal.15.
- 7 M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. (Jakarta: Serambi, 2007), hal. 319.
- 8 Ricklefs, *Sejarah Indonesia*,hal.350.
- 9 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987), hal. 84.
- 10 Saidi, *Islam dan Nasionalisme Indonesia*,...hal.2
- 11 Saidi, *Islam dan Nasionalisme Indonesia*,...hal.3
- 12 Dardiri Husni, *Jong Islamieten Bond: A Study of a Muslim Youth Movement in Indonesia During the Dutch Colonial Era, 1924 – 1942*. (Canada: Master Thesis di Universitas McGill, 1998), hal. 56.
- 13 Saidi, *Islam dan Nasionalisme Indonesia*,...hal.6-7.
- 14 Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indoesia 1900-1942*. (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 287.
- 15 Nama Indonesia dipakai pertama kali oleh Ki Hajar Dewantara (atau Soewardi Soerjaningrat) di Belanda tahun 1913 untuk organisasi *Indonesisch Persbureau* dan juga Muhammad Hatta yang mengganti nama organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda dari *Indische Vereeniging* (yang terbentuk tahun 1908) menjadi *Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia) tahun 1922.
- 16 Saidi, *Islam dan Nasionalisme Indonesia*,...hal.4-5.
- 17 Noer, *Gerakan Moderen Islam*,...hal.100.
- 18 Saidi, *Islam dan Nasionalisme Indonesia*,...hal.36.
- 19 Husni, *Jong Islamieten Bond*,..... hal. 57-61.
- 20 Husni, *Jong Islamieten Bond*,..... hal. 63-64.
- 21 Agussalim Sitompul, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta: Antara Impian dan Kenyataan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 41.
- 22 Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI, 1947-1997* (Jakarta: Logos, 2002), hal. 45-47.
- 23 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hal.427.
- 24 M. Dawan Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1996), hal.55.
- 25 Rahardjo, *Intelektual Intelegensia*,..... hal.329.
- 26 Saidi, *Islam dan Nasionalisme Indonesia*,...hal. 85-88.
- 27 M. Rusli Karim, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*. (Bandung: Mizan, 1997), hal. 102.
- 28 Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1947-1993*. (Jakarta: Intermasa, 1995), hal.60.
- 29 Agussalim Sitompul, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta: Antara Impian dan Kenyataan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal.62-63.
- 30 Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa*,... hal. 428.

- 31 Rahardjo, *Intelektual Inteligencia dan Perilaku*, hal.37.
- 32 Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam: Disertai Komentar Pro dan Kontra* (edisi digital). (Jakarta: Democracy Project, 2012), hal.12-31.
- 33 Karim, *HMI MPO dalam Kemelut*,hal.103.
- 34 Sitompul, *HMI dalam Pandangan*,... hal.62.
- 35 Latif, *Inteligencia Muslim dan Kuasa*,... hal. 435.
- 36 Lebih lanjut lihat wawancara dengan Mahbub di <http://pmiigadjahmada.wordpress.com/2013/04/07/sejarah-pasang-surut-hubungan-pmii-dan-hmi/> (diakses pada 18 April 2014)
- 37 Latif, *Inteligencia Muslim dan Kuasa*,... hal. 434.
- 38 <http://misbahulmanaf.blogspot.com/2012/09/lahirnya-pmii.html> (diakses pada 8 Maret 2014).
- 39 Kelompok Cipayung adalah forum komunikasi organisasi mahasiswa ekstra universitas yang independen dan bebas dari kooptasi partai politik manapun. Pencetus kelompok ini adalah Akbar Tanjung (saat itu Ketua Umum PB HMI), Kris Siner Key Timu (saat itu Ketua Presidium PP PMKRI) dan Binsar Sianipar (saat itu Ketua Umum PP GMKI). Kelompok Cipayung ini mempunyai komitmen tinggi untuk negara-bangsa Indonesia. Saat ini Kelompok ini sudah berkembang menjadi Kelompok Cipayung Plus yang beranggotakan HMI, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), PMII, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), Hikmahbudhi (Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia). Hingga Hingga sekarang Kelompok Cipayung masih sering berkumpul dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan untuk proses demokratisasi Indonesia yang lebih baik. Lihat <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/16/kelompok-cipayung-plus-desak-peserta-pemilu-buat-pakta-integritas> (diakses tanggal 8 Maret 2014).
- 40 <http://rayonsyahadat.wordpress.com/2012/01/11/kepmiiian/> (diakses pada 8 Maret 2014).
- 41 Latif, *Inteligencia Muslim dan Kuasa*,... hal. 436.
- 42 Ajib Purnawan, *Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Beraksi Di Tengah Badai: Catatan Kritis Sejarah Kelahiran IMM Melawan Komunisme*, (Yogyakarta: Panji, 2007), hal.6-7.
- 43 Purnawan, *Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah*,... hal.7.
- 44 http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Dakwah_Kampus (diakses pada 8 Maret 2014)
- 45 Baca selengkapnya dalam Ismail Yusanto, "LDK antara Visi, Misi, dan Realitas Sejarah Perkembangannya", *Makalah* disampaikan pada acara Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Wilayah I di Universitas Islam Sumatera Utara, Rabu 11 Juni 1997. Lihat <http://syariahpublications.com/2007/04/21/dakwah-kampus/> (diakses pada 8 Maret 2014)
- 46 Ismail Yusanto, "LDK antara Visi, Misi, dan Realitas Sejarah Perkembangannya", *Makalah* disampaikan pada acara Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Wilayah I di Universitas Islam Sumatera Utara, Rabu 11 Juni 1997. <http://syariahpublications.com/2007/04/21/dakwah-kampus/> (diakses pada 8 Maret 2014).
- 47 Acara FSLDK yang berhasil membentuk KAMMI ini dihadiri oleh 59 LDK yang berafiliasi dari 63 kampus (PTN-PTS) di seluruh Indonesia. Jumlah peserta seluruhnya sebanyak 200 orang. Lebih lanjut lihat "Profil KAMMI" dalam <http://kammi.org/ke-kammi-an/sejarah.html> (diakses pada 8 Maret 2014).
- 48 "Kilas Balik Sejarah KAMMI" dalam <http://kammi.org/ke-kammi-an/sejarah.html> (diakses pada 8 Maret 2014).
- 49 "Profil KAMMI" dalam <http://kammi.org/ke-kammi-an/sejarah.html> (diakses pada 8 Maret 2014)
- 50 "Profil KAMMI" dalam <http://kammi.org/ke-kammi-an/sejarah.html> (diakses pada 8 Maret 2014)
- 51 Andi Rahmat dan Muhammad Najib. *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus*. (Surakarta: Purimedia, 2001), hal.189-193.
- 52 Muhammad Wildan,. *Radical Islamism in Solo: a quest of Muslims' identity in a town of Central Java*. Ph.D. Thesis di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), 2009, hal.16.
- 53 Yon Machmudi, *Islamising Indonesia; the rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party*, Ph.D. Thesis, ANU E-Press, 2006, hal.30.

- 54 Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: studi kasus beberapa perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.12-13.
- 55 Lukman Hakiem dan Tamsil Linrung, *Menunaikan Panggilan Risalah: Dokumentasi Perjalanan 30 Tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia* (Jakarta: DDII, 1997), hal.3.